



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2023

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA**



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/001/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Program	: Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Target Kinerja Program	: 100 %
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Kinerja Kegiatan	: 17 Dokumen
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 12 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp10.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
KOTA
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja Dispermades PPKB
	b. Latar belakang : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa Perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan berupa Renstra Perangkat daerah dan Renja Perangkat daerah. Renstra tahun berjalan masih mengacu pada Renstra Dispermades PPKB Tahun 2023-2026 untuk

	daerah menyusun dokumen perencanaan berupa Renstra Perangkat daerah dan Renja Perangkat daerah. Renstra tahun berjalan masih mengacu pada Renstra Dispermades PPKB Tahun 2023-2026 untuk kemudian dijabarkan untuk penyusunan Renja 2023. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dispermades PPKB Tahun Anggaran 2023 dan tahapan Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023.
	c. Dilaksanakan untuk : Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
	d. Ruang lingkup : Dokumen Perencanaan Kinerja Dispermades PPKB Tahun Anggaran 2023
2.2. Sasaran (Outcome)	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
2.3. Keluaran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja sebanyak 100 persen.
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah dokumen perencanaan yang disusun b. Target Kinerja : 12 Dokumen, sebagai berikut : 1. Renstra; 2. Renja; 3. RKT; 4. RKO; 5. Rencana Aksi 6. RKA; 7. DPA; 8. RKAP; 9. DPAP; 10. Perjanjian Kinerja; 11. Perjanjian Kinerja Perubahan; 12. Pakta Integritas.

2.5. Instansi/Lembaga/Unit Lain yang Berpartisipasi	Kerja	1. Baperlitbang Kab. Banjarnegara; 2. BPPKAD Kab. Banjarnegara; 3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Banjarnegara; 4. Inspektorat Kab. Banjarnegara			
2.6. Lokasi		Kabupaten Banjarnegara			
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Pengumpulan Data		Bulan Januari 2023, Minggu Pertama			
3.2. Evaluasi Tahun Lalu		Bulan Januari 2023, Minggu Pertama			
3.3. Penyusunan RKO		Bulan Januari 2023, Minggu Kedua			
3.4. Penyusunan Rencana Aksi		Bulan Januari 2023, Minggu Kedua			
3.5. Penyusunan Perjanjian Kinerja		Bulan Januari 2023, Minggu Kedua			
3.6. Penyusunan Pakta Integritas		Bulan Januari 2023, Minggu Kedua			
3.7. Penyusunan Renja		Bulan Januari 2023, Minggu Ketiga			
3.8. Penyusunan RKA		Bulan Juli 2023, Minggu Pertama			
3.9. Penyusunan RKAP		Bulan Juli 2023, Minggu Ketiga			
3.10. Penyusunan DPAP		Bulan September 2023, Minggu Kedua			
3.11. Penyusunan DPA		Bulan Desember 2023, Minggu Pertama			
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total	Ket
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8 OB	Rp1.010.000,00	Rp8.080.000,00	
2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1 Paket	Rp58.000,00	Rp58.000,00	
3.	Belanja Kertas dan Cover	1 Paket	Rp572.000,00	Rp572.000,00	
4.	Belanja Bahan Cetak	1 Paket	Rp1.290.000,00	Rp1.290.000,00	
	Jumlah			Rp10.000.000,00	
5. Lain-Lain (diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)					
 Penanggung Jawab Kepala DISPERMADES PPKB Kab. Banjarnegara <i>[Signature]</i> HENDRO CAHYONO, SE, M.Si NIP. 19811130 199703 1 007					



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/002/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Program	: Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Target Kinerja Program	: 100 %
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Kinerja Kegiatan	: 17 Dokumen
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 5 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp10.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
KOTA
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Menyusun Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Dispermades PPKB
	b. Latar belakang : Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur

	capaian kinerja serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
	c. Dilaksanakan untuk : Menyusun dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah.
	d. Ruang lingkup : Dokumen Pelaporan Kinerja Kinerja Dispermades PPKB Tahun Anggaran 2022
2.2. Sasaran (Outcome)	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
2.3. Keluaran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja sebanyak 100 persen.
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah dokumen pelaporan Kinerja yang disusun
	b. Target Kinerja : 5 Dokumen, terdiri dari 1. Pengendalian Operasional Kegiatan (POK); 2. Pengukuran Kinerja Triwulanan; 3. Rencana Tindak Pengendalian (RTP); 4. Dokumen Evaluasi Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJ-IP); 5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	1. Baperlitbang Kab. Banjarnegara; 2. BPPKAD Kab. Banjarnegara; 3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Banjarnegara; 4. Inspektorat Kab. Banjarnegara
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara
3. Tahapan Aktivitas	
3.1. Pengumpulan Data	Bulan Januari s.d Desember 2023
3.2. Penyusunan POK	Bulan Januari s.d Desember 2023, Minggu Keempat
3.3. Penyusunan RTP	Bulan Januari- Februari 2023, Minggu Kedua
3.4. Penyusunan LKJIP	Bulan Januari - Maret 2023, Minggu Kedua
3.5. Penyusunan LKPJ	Bulan Januari - Maret 2023, Minggu Kedua
4. Anggaran	
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara	

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total	Ket
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1 Paket	Rp4.822.400,00	Rp4.822.400,00	
2.	Belanja Kertas dan Cover	1 Paket	Rp1.430.000,00	Rp1.430.000,00	
3.	Belanja Bahan Cetak	1 Paket	Rp3.747.600,00	Rp3.747.600,00	
	Jumlah			Rp10.000.000,00	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarmasin

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/003/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Program	: .Persentase Pemenuhan Penunjan Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi
Target Kinerja Program	: 100 %
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Hasil	: Persentase Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Target Kinerja Kegiatan	: 100%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 41 Orang/Bulan
Pagu Anggaran	: Rp5.249.252.546,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN
	b. Latar belakang : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dispermades PPKB untuk memenuhi kebutuhan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN sebanyak 40 orang.

	c. Dilaksanakan untuk : Memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara adil dan layak sesuai ketentuan yang berlaku.				
	d. Ruang lingkup : Gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN dibayarkan kepada ASN di lingkup Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara untuk tahun anggaran 2023.				
2.2. Sasaran (Outcome)	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				
2.3. Keluaran	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi sebanyak 100 persen.				
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
	b. Target Kinerja : 40 orang				
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	BPPKAD Kab. Banjarnegara;				
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Pengajuan Gaji ASN	Bulan Januari s.d Desember 2023, Minggu Keempat				
3.2. Pengajuan Tunjangan ASN	Bulan Januari s.d Desember 2023, Minggu Pertama				
4. Anggaran :					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total	Ket
1.	Belanja Gaji ASN	1 Tahun	Rp2.894.542.370,00	Rp2.894.542.370,00	
2.	Belanja Tamsil ASN	1 Tahun	Rp2.354.710.136,00	Rp2.354.710.136,00	
	Jumlah			Rp5.249.252.546,00	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara

HENDRO SAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19861130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/004/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENARAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Program	: .Persentase Pemenuhan Penunjan Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi
Target Kinerja Program	: 100 %
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Hasil	: Persentase Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Target Kinerja Kegiatan	: 100%
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 12 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp101.140.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

KOTA

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN

PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	b. Latar belakang : Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan wewenangnya PA dibantu oleh Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan. Maksud dari Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan adalah Terlayannya administrasi perkantoran Tujuan kegiatan yaitu terbayarnya honorarium pengelola keuangan pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat pembantu penatausahaan keuangan serta pejabat pembuat komitmen. Uraian belanja terdiri dari Honorarium pengelola keuangan yaitu Pengguna Anggaran, PPKom,

	Bendahara Pengeluaran SKPD, Pengurus Gaji, Operator Simda, PPK SKPD, Verifikasi, Akuntansi, Membuat dokumen dan pengeluaran dan Pencatat Pembukuan).				
	c. Dilaksanakan untuk : Memenuhi kebutuhan honorarium pengelolaan keuangan Perangkat daerah.				
	d. Ruang lingkup : Pembayaran jasa administrasi keuangan dibayarkan untuk petugas pengelola keuangan di lingkup Dispermades PPKB selama 12 bulan di Tahun Anggaran 2023.				
2.2.Sasaran (Outcome)	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja				
2.3.Keluaran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja sebanyak 100 persen.				
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
	b. Target Kinerja : 12 Dokumen				
2.5.Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	BPPKAD Kab. Banjarnegara;				
2.6.Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1.Pengajuan pembayaran honorarium pengelola keuangan	Bulan Januari s.d Desember 2023, Minggu Keempat				
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	12 OB	2.685.000	32.220.000	
2.	Honorarium PPKom	12 OB	2.590.000	31.080.000	
3.	Honorarium PPK	12 OB	950.000	11.400.000	
4.	Honorarium Bendahara Pengeluaran	12 OB	790.000	9.480.000	
5.	Honorarium Operator Simda	12 OB	150.000	1.800.000	
6.	Honorarium Pengurus Barang	12 OB	175.000	2.100.000	
7.	Honorarium Penyimpan Barang	12 OB	150.000	1.800.000	

8.	Honorarium Pembuat Dokumen Pengeluaran	12 OB	150.000	1.800.000	
9.	Honorarium Verifikator OPD	12 OB	400.000	4.800.000	
10.	Honorarium Petugas Akuntansi	12 OB	250.000	3.000.000	
11.	Belanja Alat Tulis Kantor	1 Paket	545.000	545.000	
12.	Belanja Kertas dan Cover	1 Paket	275.000	275.000	
13.	Belanja Cetak	1 Paket	840.000	840.000	
	Jumlah			101.140.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DispermaDES PPKB
Kab. Banjarnegara

[Handwritten signature]

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/005/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Program	: Persentase Pemenuhan Penunjan Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi
Target Kinerja Program	: 100 %
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Hasil	: Persentase Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah
Target Kinerja Kegiatan	: 100%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 12 Paket
Pagu Anggaran	: Rp20.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
KOTA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
	b. Latar belakang : Dalam rangka menunjang kelancaran dan kenyamanan pelayanan kantor, maka perlu ditunjang dengan tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor.
	c. Dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan alat dan bahan pembersih kantor
	d. Ruang lingkup : Dispermades PPKB dan Gedung PKK Kabupaten Banjarnegara untuk satu tahun anggaran 2023.
2.2. Sasaran (Outcome)	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
2.3. Keluaran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja sebanyak 100 persen.
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

	b. Target Kinerja : 12 Paket																								
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	-																								
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara																								
3. Tahapan Aktivitas																									
3.1. Belanja alat /bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	Bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September dan November 2023																								
4. Anggaran Rp20.050.000,00																									
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara																									
<table><tr><th>No</th><th>Tahapan Aktivitas</th><th>Satuan Volume</th><th>Harga Satuan</th><th>Total (Rp)</th><th>Ket</th></tr><tr><td>1.</td><td>Belanja Bahan kimia</td><td>1 paket</td><td>260.000</td><td>260.000</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td><td>1 paket</td><td>19.740.000</td><td>19.740.000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td>20.000.000</td><td></td></tr></table>		No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket	1.	Belanja Bahan kimia	1 paket	260.000	260.000		2.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	19.740.000	19.740.000			Jumlah			20.000.000	
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket																				
1.	Belanja Bahan kimia	1 paket	260.000	260.000																					
2.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	19.740.000	19.740.000																					
	Jumlah			20.000.000																					
5. Lain-Lain (diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)																									
 Penanggung Jawab Kepala DisPERMADES PPKB Kab. Banjarnegara HENDRO CAHYONO, SE, M.Si NIP. 19881130 199703 1 007																									



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/006/KAK_DISPMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Program	: Persentase Pemenuhan Penunjan Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi
Target Kinerja Program	: 100 %
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Hasil	: Persentase Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah
Target Kinerja Kegiatan	: 100%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 12 Paket
Pagu Anggaran	: Rp550.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA

KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Tersedianya Bahan Logistik Kantor
	b. Latar belakang : Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan perkantoran, perlu ditunjang dengan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor.
	c. Dilaksanakan : Terselenggaranya pemenuhan logistik kantor.
	d. Ruang lingkup : Dispermades PPKB, Gedung PKK dan 20 Balai KB Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara Tahun ANggaran 2023
2.2. Sasaran (Outcome)	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah
2.3. Keluaran	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi sebanyak 100 persen.
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

	b. Target Kinerja : 12 Paket				
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	-				
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Honorarium panitia pelaksana	Bulan Januari s.d Desember Minggu keempat				
3.2. Belanja pengisian tabung gas	Bulan Januari s.d Desember Minggu pertama				
3.3. Belanja bahan pakai habis	Bulan Januari s.d Desember Minggu pertama				
3.4. Belanja bahan computer lainnya	Bulan Januari s.d Desember Minggu pertama				
3.5. Belanja kertas	Bulan Januari s.d Desember Minggu pertama				
3.6. Belanja cetak dan fotocopy	Bulan Januari s.d Desember				
3.7. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	Bulan Januari s.d Desember				
3.8. Belanja alat listrik dan elektronik	Bulan Januari dan Juni pertama				
3.9. Belanja makanan dan minuman harian pegawai	Bulan Januari s.d Desember Minggu pertama				
3.10. Belanja makanan dan minuman rapat	Bulan Januari s.d Desember Minggu pertama				
3.11. Belanja makanan dan minuman tamu	Bulan Januari s.d Desember 2022 minggu pertama, kedua, ketiga, keempat				
3.12. Belanja perjalanan dinas biasa (luar kota)	Bulan Januari s.d Desember 2022, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat				
4. Anggaran Rp550.000.000,00					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Honorarium panitia pelaksana	12	1.210.000	14.520.000	
2.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	18	200.000	3.600.000	
3.	Belanja pengisian tabung gas	1 paket	20.186.900	20.186.900	

4.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – ATK	12	289.000	3.468.000	
5.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – kertas dan cover	1 paket	16.170.000	16.170.000	
6.	Belanaj cetak dan fotocopy	1 paket	21.938.200	21.938.200	
7.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	50 lembar	10.000	500.000	
8.	Belanja alat listrik dan elektronik	1 paket	3.767.900	3.767.900	
9.	Belanja Natura dan Pakan Natura	1 paket	11.000.000	11.000.000	
10.	Belanja makanan dan minuman rapat	1 paket	18.000.000	18.000.000	
11.	Belanja makanan dan minuman tamu	1 paket	4.700.000	4.700.000	
12.	Belanja perjalanan dinas biasa (luar kota)	1 paket	216.559.000	216.559.000	
13.	Belanja perjalanan dinas dalam kota	1 paket	215.590.000	215.590.000	
	Jumlah			550.000.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/007/KAK_DISPMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Program	: .Persentase Pemenuhan Penunjan Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi
Target Kinerja Program	: 100 %
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Hasil	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi
Target Kinerja Kegiatan	: 100%
Sub Kegiatan	: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 1 Unit
Pagu Anggaran	: Rp2.100.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
KOTA
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2022
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Mengadakan/rehabilitasi gedung kantor SKPD pada Dispermades PPKB guna mendukung kelancaran layanan perkantoran.
	b. Latar belakang : Dalam rangka menunjang kelancaran dan optimalisasi kegiatan, koordinasi serta pelayanan perkantran perlu ditunjang dengan adanya fasilitas gedung yang aman dan layak. Sehubungan dengan adanya kebutuhan ruang aula dan ruang perkantoran, Dispermades PPKB bermaksud mengadakan dan menyelenggarakan Gedung Kantor. Pengadaan/rehabilitasi tersebut melalui penambahan ruangan menjadi dua lantai pada Gedung Dispermades PPKB bangunan depan/lama. Peruntukan gedung lantai 2 yaitu direncanakan untuk Aula Pertemuan serta ruang kerja Bidang Pemerintahan Desa, Kelembaaan dan Perencanaan Partisipati.

	c. Dilaksanakan untuk : Terselenggaranya pembangunan gedung kantor.				
	d. Ruang lingkup : Pembangunan Gedung Dispermades PPKB Tahun Anggaran 2023.				
2.2.Sasaran (Outcome)	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja				
2.3.Keluaran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja sebanyak 100 persen.				
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				
	b. Target Kinerja : 1 Unit				
2.5.Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	DPUPR Kab. Banjarnegara; BPPKAD Kab. Banjarnegara.				
2.6.Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1.Persiapan pengadaan	Bulan Januari - Februari 2023				
3.2.Pengadaan Gedung	Bulan Maret - Agustus 2023				
3.3.Evaluasi	Bulan Agustus 2023, Minggu Pertama				
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	12 Bulan	1.910.000	22.920.000	
2.	Belanja ATK	1 Paket	3.178.800	3.178.800	
3.	Belanja Bahan Cetak	1 Paket	286.500	286.500	
4.	Belanja Makan dan Minum Rapat	1 Paket	1.750.000	1.750.000	
5.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	2.071.846.700	2.071.846.700	
	Jumlah			2.100.000.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Bangoregara

HENDRO SANYONO, SE, M.Si
NIP. 19651130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/008/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Program	: .Persentase Pemenuhan Penunjan Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi
Target Kinerja Program	: 100 %
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Hasil	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi
Target Kinerja Kegiatan	: 100%
Sub Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 20 Unit
Pagu Anggaran	: Rp260.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
KOTA
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PARASARANA GEDUNG KANTOR
ATAU BANGUNAN LAINNYA
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2022
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Mengadakan perlengkapan gedung kantor SKPD pada Dispermades PPKB guna mendukung kelancaran layanan perkantoran.
	b. Latar belakang : Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dalam pelaksanaannya yaitu mengidentifikasi dan melaksanakan pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan dan telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan kegiatan. Pengadaan dilaksanakan dalam rangka menunjang kinerja organisasi perangkat daerah, untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi.
	c. Dilaksanakan untuk : Mengidentifikasi kebutuhan dan melaksanakan pengadaan perlengkapan gedung kantor

	d. Ruang lingkup : Barang yang diadakan untuk kepentingan operasional layanan perkantoran pada Dispermades PPKB Tahun Anggaran 2023.				
2.2.Sasaran (Outcome)	c. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026				
2.3.Keluaran	d. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023				
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				
	b. Target Kinerja : 39 Unit				
2.5.Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	BPPKAD Kab. Banjarnegara;				
2.6.Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1.Persiapan pengadaan	Bulan Januari 2023				
3.2.Pengadaan Barang	Bulan Maret - April 2023, Minggu				
3.3.Evaluasi	Bulan April 2023, Minggu Pertama				
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Belanja Kertas-Cover	1 Paket	110.000	110.000	
2.	Belanja Bahan Cetak	1 Paket	30.000	30.000	
3.	Belanja Air Conditioning (AC)	4 Buah	6.011.000	24.044.000	
4.	Televisi LED 32 Inchi	2 Buah	7.205.000	14.410.000	
5.	Televisi LED 42 Inchi	1 Buah	11.102.000	11.102.000	
6.	Kursi Tunggu	5 Buah	4.500.000	22.500.000	
7.	Meja Kerja staf	5 unit	3.076.000	15.380.000	
8.	Laptop	8 Unit	15.000.000	120.000.000	
9.	Printer Scanner	14 Unit	3.691.000	51.674.000	
10.	Honorarium Pejabat Pengadaan	3 OK	250.000	750.000	
	Jumlah			260.000.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si

NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/009/KAK_DISPMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Program	: Persentase Pemenuhan Penunjan Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi
Target Kinerja Program	: 100 %
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil	: Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target Kinerja Kegiatan	: 100%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 12 Laporan
Pagu Anggaran	: Rp70.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
KOTA
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	b. Latar belakang : Dalam rangka menunjang kelancaran dan optimalisasi kegiatan, koordinasi serta pelayanan perkantoran, maka perlu ditunjang dengan adanya fasilitas listrik, air telephone dan jaringan internet yang memadai. Sehubungan hal tersebut perlu adanya fasilitasi yang menjamin ketersediaan sumberdaya listrik, air, telephone dan internet setiap bulannya.
	c. Dilaksanakan untuk : Terselenggaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik, telpon, air, internet kantor.
	d. Ruang lingkup : Penyediaan sumberdaya listrik, telpon, air, internet kantor lingkup Dispermades PPKB Tahun Anggaran 2023.

2.2.Sasaran (Outcome)	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja				
2.3.Keluaran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja sebanyak 100 persen.				
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
	b. Target Kinerja : 12 Laporan				
2.5.Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	BPPKAD Kab. Banjarnegara.				
2.6.Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1.Belanja tagihan telepon	Bulan Januari s.d Desember 2022, Minggu kedua				
3.2.Belanja tagihan air	Bulan Januari s.d Desember 2022, Minggu kedua				
3.3.Belanja tagihan listrik	Bulan Januari s.d Desember 2022, Minggu kedua				
3.4.Belanja kawat/faximili/internet/TV berlangganan	Bulan Januari s.d Desember 2022, Minggu kedua				
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Fotocopy	1 Paket	300.000	300.000	
2.	Benda Pos	1 Paket	100.000	100.000	
3.	Tagihan Telephone	12 Paket	200.000	2.400.000	
4.	Tagihan Air	12 Paket	100.000	1.200.000	
5.	Belanja Listrik	18 Paket	1.000.000	18.000.000	
6.	Belanja Internet	12 Paket	4.000.000	48.000.000	
	Jumlah			70.000.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Pananggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara

Handwritten signature

HEINDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/010/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Program	: .Persentase Pemenuhan Penunjan Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi
Target Kinerja Program	: 100 %
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjanh Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil	: Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target Kinerja Kegiatan	: 100%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 12 Laporan
Pagu Anggaran	: Rp932.813.483,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
KOTA

KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
	b. Latar belakang : Dalam rangka menunjang kelancaran dan optimalisasi kegiatan serta dikarenakan keterbatasan sumberdaya ASN, maka perlu ditunjang dengan ketersediaan jasa pelayanan kantor. Sehubungan hal tersebut, perlu adanya fasilitasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	c. Dilaksanakan untuk : mencukupi pembayaran honorarium/upah PTT dan THL, tenaga kebersihan, tenaga keamanan.
	d. Ruang lingkup : Pembayaran honorarium/upah PTT dan THL, tenaga kebersihan, tenaga keamanan lingkup Dispermades PPKB Tahun Anggaran 2023.

2.2.Sasaran (Outcome)	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
2.3.Keluaran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja sebanyak 100 persen.
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
	b. Target Kinerja : 12 Laporan
2.5.Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	BPPKAD Kab. Banjarnegara.
2.6.Lokasi	Kabupaten Banjarnegara
3. Tahapan Aktivitas	
3.1.Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	Bulan Februari 2023, minggu pertama
3.2.Belanja alat /bahan untuk kegiatan kantor –kertas dan cover	Bulan Februari 2023, minggu pertama
3.3.Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	Bulan Februari 2023, minggu pertama
3.4.Belanja jasa tenaga administrasi	Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember,minggu keempat
3.5.Belanja jasa tenaga kebersihan	Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember,minggu keempat
3.6.Belanja jasa tenaga keamanan	Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember,minggu keempat
3.7.Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non-ASN	Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember,minggu keempat
3.8.Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non-ASN	Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember,minggu keempat
3.9.Belanja iuran jaminan kematian bagi Non-ASN	Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember,minggu keempat
4. Anggaran	
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara	

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Alat Tulis Kantor	1 Paket	215.000	215.000	
2.	Kertas-Cover	1 Paket	165.000	165.000	
3.	Fotocopy	1 Paket	1.072.500	1.072.500	
4.	Honorarium PTT dan THL	1 Paket	588.731.000	588.731.000	
5.	Upah Kebersihan	12 Paket	2.000.000	240.000.000	
6.	Honorarium Keamanan (Harian lepas)	1 Paket	68.600.000	68.600.000	
7.	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	1 Paket	28.158.000	18.000.000	
8.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	12 Paket	1.467.999	48.000.000	
9.	Iuran Jaminan Kematian		4.403.984.000		
	Jumlah			932.813.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarmasin

[Signature]
HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/011/KAK_DISPMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Program	: Persentase Pemenuhan Penunjan Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi
Target Kinerja Program	: 100 %
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil	: Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
Target Kinerja Kegiatan	: 100%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 12 Unit
Pagu Anggaran	: Rp165.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
KOTA

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN,
PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
	b. Latar belakang : Dalam rangka menunjang kelancaran operasional pelayanan Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara, perlu didukung ketersediaan kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik dan layak untuk operasional. Sehubungan hal tersebut perlu diselenggarakannya pemeliharaan kendaraan dinas operasional untuk menjamin kendaraan dinas layak digunakan setiap waktu. Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan kendaraan dinas operasional sehingga selalu dalam kondisi baik dan bisa menunjang kelancaran kinerja dinas.

	c. Dilaksanakan untuk : Menfasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor.				
	d. Ruang lingkup : Kendaraan dinas yang yang dipelihara yaitu kendaraan dinas operasional lingkup Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara Tahun Anggaran 2023.				
2.2.Sasaran (Outcome)	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				
2.3.Keluaran	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi sebanyak 100 persen.				
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				
	b. Target Kinerja : 12 Unit				
2.5.Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	BPPKAD Kab. Banjarnegara;				
2.6.Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1.Service Kendaraan Dinas	Bulan Januari s.d Desember 2023, setiap minggu				
3.2.Pembayaran pajak kendaraan dinas	Bulan Januari s.d Desember 2023, sesuai jadwal pembayaran pajak kendaraan dinas				
3.3.Evaluasi	Bulan Januari s.d Desember 2023, Minggu keempat				
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawab Keuangan	12 Bulan	630.000	7.560.000	
2.	Belanja Bahan Cetak	1 Paket	60.000	60.000	
3.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	12.000.000	12.000.000	
4.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	100.500.000	100.500.000	

5.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas (Kendaraan Bermotor Penumpang)	1 Paket	34.880.000	34.880.000	
6.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas (Kendaraan Bermotor Angkutan Barang)	1 Paket	10.000.000	10.000.000	
	Jumlah			165.000.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 1968/1130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/012/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Program	: Persentase Pemenuhan Penunjan Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi
Target Kinerja Program	: 100 %
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil	: Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
Target Kinerja Kegiatan	: 100%
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 22 Unit
Pagu Anggaran	: Rp100.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
KOTA

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	b. Latar belakang : Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk meningkatkan kinerja pegawai, perlu didukung dengan kenyamanan kondisi gedung kantor. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pemeliharaan gedung kantor untuk menjamin kondisi tetap nyaman guna menunjang kelancaran operasional kegiatan.
	c. Dilaksanakan untuk : Memfasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan gedung kantor agar tetap representatif dan nyaman guna kelancaran pelaksanaan pelayanan perkantoran.

	d. Ruang lingkup : Kegiatan pemeliharaan gedung kantor dilaksanakan di Gedung Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara dan Gedung PKK Kabupaten Banjarnegara serta 20 Balai KB Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023.				
2.2.Sasaran (Outcome)	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				
2.3.Keluaran	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi sebanyak 100 persen.				
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi				
	b. Target Kinerja : 22 Unit				
2.5.Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	BPPKAD Kab. Banjarnegara;				
2.6.Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1.Pemeliharaan Gedung/Bangunan	Bulan Januari s.d Desember 2023				
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Belanja Bahan Bangunan dan konstruksi	1 Paket	50.795.780	50.795.780	
2.	Belanja Jasa Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1 Paket	49.200.000	49.200.000	
3.	Belanja Bahan Lainnya	1 Paket	4.220	4.220	
	Jumlah			100.000.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)

Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara



[Signature]
WENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/013/KAK_DISPMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Program	: Persentase Pemenuhan Penunjan Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi
Target Kinerja Program	: 100 %
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil	: Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
Target Kinerja Kegiatan	: 100%
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 22 Unit
Pagu Anggaran	: Rp45.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
KOTA

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA
PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	b. Latar belakang : Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk meningkatkan kinerja pegawai, perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik dan layak digunakan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran pelayanan dan operasional kegiatan.

	c. Dilaksanakan untuk : Memfasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya agar tetap representatif dan nyaman guna kelancaran pelaksanaan pelayanan perkantoran.				
	d. Ruang lingkup : Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya pada di Gedung Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara dan Gedung PKK Kabupaten Banjarnegara serta 20 Balai KB Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara.				
2.2.Sasaran (Outcome)	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				
2.3.Keluaran	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi sebanyak 100 persen.				
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
	b. Target Kinerja : 22 Unit				
2.5.Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	BPPKAD Kab. Banjarnegara;				
2.6.Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1.Pemeliharaan Gadung/Bangunan	Bulan Januari s.d Desember 2023				
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Fotocopy	1 Paket	60.000	60.000	
2.	Pemeliharaan Elektrik Generating Set	1 Paket	7.190.000	7.190.000	
3.	Pemeliharaan Alat Pendingin	15 Paket	610.000	9.150.000	
4.	Pemeliharaan Personal Komputer	25 Paket	730.000	18.250.000	
5.	Pemeliharaan Peralatan Pesonal Komputer	15 Paket Paket	690.000	10.350.000	
	Jumlah			45.000.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Tanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara


HENDRO SAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/014/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Penataan Desa
Capaian Program	: Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Target Kinerja Program	: 37.00 %
Kegiatan	: Penyelenggaraan Penataan Desa
Hasil	: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayah
Target Kinerja Kegiatan	: 266 Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Desa
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 3 Unit
Pagu Anggaran	: Rp130.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENATAAN DESA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA
SUB KEGIATAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA DESA
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan TMMD dan pendampingan bantuan keuangan infrastruktur.
	b. Latar belakang : 1. DASAR HUKUM a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;; b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022; c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

	Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 265); d. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Banjarnegara e. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan; f. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa; g. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 99, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 98). 2. GAMBARAN UMUM a. Pendampingan Keuangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai isu strategis kemiskinan. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah des, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Tengah, serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu memberikan stimulant bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaannya pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dapat dilakukan sesuai prinsip dan tata kelola yang baik dengan mengedepankan prinsip perencanaan Desa yang baik pula. Adanya kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah
--	---

	desa sudah menjadi keharusan bahwa kegiatan tersebut sudah harus tertuang dalam RPJMDesa, yang selanjutnya juga sudah dimasukkan dalam RKPDesa yang kemudian dijabarkan ke dalam APBDesa. Fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dikelola digunakan untuk membiayai peningkatan sarana prasarana perdesaan, pengembangan kawasan perdesaan, dan pengembangan desa wisata. Fasilitasi kegiatan bantuan keuangan berupa Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan yang dikelola dapat digunakan untuk pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan/ pemeliharaan/ bangunan pendukung jalan desa/ kelurahan dengan prioritas jalan desa/ kelurahan yang menghubungkan jalan desa/ kelurahan lainnya atau jalan desa/ kelurahan yang menghubungkan dengan jalan kabupaten. Fasilitasi bantuan keuangan khusus yang dikelola adalah yang dapat digunakan untuk sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. b. Pendampingan TNI Manunggal Membangun Desa Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah suatu program lintas sectoral yang melibatkan kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara TNI dan unsur-unsur pemerintah daerah serta melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, memantapkan kesadaran bermasyarakat dalam kehidupan berbangsa bernegara dan bela negara disamping itu TMMD merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan pembangunan dalam pengembangan kemitraan penggalangan, kepedulian antar anggota masyarakat yang semuanya bermuara pada terwujudnya stabilitas nasional yang mendukung
--	---

	keberhasilan pembangunan bangsa. Program TMMD di usahakan tetap realistis dan semakin menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling mendasar, sedangkan dalam pelaksanaannya tetap terpadu dan diarahkan untuk mengurangi beban kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat terutama sarana jalan yang telah rusak dan menghambat arus transportasi serta angkutan hasil bumi.
	c. Dilaksanakan untuk 1. Melaksanakan pembangunan kewilayahan di desa secara partisipatif; 2. Mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong royong dalam kegiatan pembangunan; 3. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana perdesaan
	d. Ruang lingkup : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat dan mengeksplorasi seluruh sumber daya produktif untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Sasaran (Outcome)	Terwujudnya penataan desa
3. Keluaran	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
1. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Desa
	b. Target Kinerja : 1. 3 Desa Pelaksana TMMD , Rp440.690.000,00 swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan TMMD 2. 204 desa yang didampingi dalam pengelolaan bantuan keuangan bidang sarana prasarana perdesaa
2. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	1. Kodim 0704 Banjarnegara 2. DPU PR Kabupaten Banjarnegara 3. Camat
3. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara Pendamping TMMD a) Sengkuyung I Desa Pegundungan Kecamatan Pejawaran

	b) Sengkuyung II Desa Ambal Kecamatan Karangobar c) Sengkuyung III Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan
3. Tahapan Aktivitas Bantuan Keuangan Infrastruktur	
3.1. Permohonan kepada Gubernur (pencairan)	Bulan Januari s/d Februari Minggu 1 s/d minggu 4 Bulan Mei s/d Juni Minggu 1 s/d minggu 4 Bulan September s/d Oktober Minggu 1 s/d minggu 4
3.2. Pemberitahuan kepada desa penerima bantuan	Bulan Maret s/d April Minggu 1 s/d minggu 4 Bulan Juni s/d Agustus Minggu 1 s/d Minggu 4 Bulan November s/d Desember Minggu 1 s/d Minggu 4
3.3. Verifikasi administrasi dan lokus	Bulan Januari s/d Desember Minggu 1 s/d minggu 4
3.4. Identifikasi lokasi	Bulan Januari s/d Desember Minggu 1 s/d minggu 4
3.5. Membuat Draft SK Bupati	Bulan Januari s/d Desember Minggu 1 s/d minggu 4
3.6. Penyusunan berkas pencairan	Bulan Januari s/d Desember Minggu 1 s/d minggu 4
3.7. Pelaksanaan	Bulan Januari s/d Desember Minggu 1 s/d minggu 4
3.8. Monitoring dan Evaluasi	Bulan Januari s/d Desember Minggu 1 s/d minggu 4
3.9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Bulan Januari s/d Desember
Pendamping TMMD	
3.1. Persiapan (rakor)	Januari s/d Maret, Mei s/d Oktober Minggu 1 s/d minggu 4
3.2. Pra	Januari s/d Februari, Maret s/d April, Juli s/d Agustus Minggu 2 s/d minggu 4
3.3. Pelaksanaan	Maret s/d April, Juni s/d Juli, September s/d Oktober minggu 1 s/d minggu 4
3.4. Monev	Mei, Agustus dan November minggu 1 s/d minggu 4
3.5. Pelaporan	Mei, Agustus dan November minggu 1 s/d minggu 4
3.6. Rakor pentupan	April s/d Mei, Juli s/d Agustus dan Oktober s/d November minggu 1 s/d minggu 4
4. Anggaran Rp130.000.000,00	

Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Belanja Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Paket	6.516.400,00	6.516.400,00	
2.	Belanja Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Paket	1.925.000,00	1.925.000,00	
3.	Belanja Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Paket	12.927.000,00	12.927.000,00	
4.	Belanja Kegiatan Kantor-Benda Pos	Paket	440.000,00	440.000,00	
5.	Belanja Makan dan Minum Rapat	Paket	57.525.000,00	57.525.000,00	
6.	Belanja Honorarium Narasumber/ Pembahas Moderator, Pembawa Acara dan panitia	Paket	25.950.000,00	25.950.000,00	
7.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Paket	1.200.000,00	1.200.000,00	
8.	Belanja Jasa Tata Rias	Paket	1.566.600,00	1.566.600,00	
9.	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	
10.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Paket	2.250.000,00	2.250.000,00	
	Total			130.000.000,00	

5. Lain-Lain



Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
KEGIATAN FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA
SUB FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
1.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
1.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
1.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
1.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Melaksanakan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
	b. Latar belakang : a. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

	6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 8. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa 9. Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama di Bidang Pemerintahan Desa 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupate Banjarnegara; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bajrnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara. b. Gambaran Umum Pada hakekatnya kerja sama desa merupakan hak kewenangan yang dimiliki desa. Kerja sama desa merupakan salah satu indikator tumbuhnya pemahaman terhadap hak
--	---

	dan kewenangan yang dimiliki, pemahaman terhadap potensi sumber daya, tantangan yang dihadapi, serta solusi untuk menjadikan desa berkembang dan mandiri. Disamping itu kerja sama desa merupakan satu pilar penting untuk menjawab dan mewujudkan tujuan pembangunan desa sendiri, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Setiap desa memiliki keunikan dan potensi masing-masing. Baik dari aspek :sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi maupun sumber daya social budaya. Pengembangan kawasan perdesaan dimaksudkans ebagai ikhtiar kerja sama antar desa agar tujuan kesejahteraan masyarakat dan desa lebih cepat tercapai. Penetapan Kawasan yang mengolah pengelolaan potensi desa masing-masing, pada akhirnya, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan atau pemberdayaan masyarakat pada desa-desa dalam kawasan perdesaan dansekitarnya. Kawasan perdesaan yang telah terbentuk di KabupatenBanjarnegara, adalah : - Kawisesa (Kawasan Wisata Serayu Sigaluh) dengan SK Bupati Banjarnegara Nomor 410/486 Tahun 2019 Tanggal 29 April 2019. - Pajang Kaloka dengan SK Bupati Banjarnegara Nomor 050/64 Tahun 2021 Tanggal 16 Februari 2021 - Kecamatan Pejawaran dalam proses pengusulan menjadi kawasan perdesaan
	c. Dilaksanakan untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan - Memberikan gambaran tentang makna dan arti pentingnya kerja sama desa; - Memberikan gambaran tentang tata cara kerja sama desa serta jenis –

	jenis kerja sama desa; 3. Memberikan wawasan tentang aturan yang berlaku dalam kerja sama desa 4. Memberikan gambaran manfaat kerja sama desa; 5. Menyediakan acuan bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan pengembangan Kawasan Perdesaan; 6. Mendorong sinergitas perumusan dan implementasi kebijakan nasional, daerah dan desa dalam pengembangan komoditas strategis dan komoditas unggulan sesuai dengan potensi masing-masing desa / wilayah; 7. Memadukan beberapa program dan kegiatan pertanian, pariwisata, dan usaha ekonomi produktif menjadi suatu kesatuan perspektif, sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas untuk kesejahteraan masyarakat dan desa di lokasi Kawasan perdesaan. Pelatihan Kelembagaan BKAD dalam Kawasan 1. Memberikan pemahaman bersama tentang tugas pokok, peran, dan fungsi kelembagaan 2. Memberikan pengetahuan mengenai kebijakan dan prosedur kerja sama antar desa di bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan. 3. Memberikan pengetahuan tentang aspek-aspek strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan beserta pengembangannya. 4. Memberikan pemahaman tentang sinergitas perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
	d. Ruang lingkup : 1. Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Banjarnegara 2. Melaksanakan pelatihan Kelembagaan BKAD dalam Kawasan

2.2. Sasaran (Outcome)	1. Terlaksananya pelatihan pemetaan kawasan; 2. Tersusunnya regulasi penetapan kawasan perdesaan
2.3. Keluaran	1. Adanya kesepahaman tentang teori pemberdayaan dan keberlanjutan program 2. Dipahaminya tugas pokok, peran, dan fungsi kelembagaan 3. Tersusunnya rencana strategis guna percepatan program pembangunan kawasan perdesaan 4. Tersusunnya dokumen rencana kerja tindak lanjut (RKTL) dari pelatihan ini 5. Jumlah dokumen kawasan perdesaan yang tersusun 6. Jumlah pengurus kelembagaan BKAD yang terlatih Pelaksanaan FGD Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 1. Tindak lanjut dari penetapan Kawasan Perdesaan 2. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan perdesaan strategis yang terpadu antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun) 3. Meningkatkan fungsi kawasan perdesaan yang mandiri, maju, berdaya saing dan berkelanjutan 4. Mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing komponen pada masing-masing subsistem klaster 5. Mengidentifikasi isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing subsistem 6. Mengidentifikasi komponen yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan Sarasehan Kawasan Perdesaan 1. Memahami permasalahan dalam kawasan perdesaan

	2. Mampu mengevaluasi faktor – faktor yang berpengaruh dan apa saja kendala yang dihadapi 3. Memahami pemecahan masalah 4. Mampu menyusun rencana kegiatan 5. Melaksanakan dan menerapkan rencana kegiatan 6. Meningkatkan peran masing-masing subyek kelembagaan dalam kawasan perdesaan 7. Mewujudkan hubungan timbal balik yang serasi dalam komponen kawasan perdesaan; 8. Meningkatkan komunikasi antar komponen dalam kawasan perdesaan.
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : - Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
	b. Target Kinerja : - 1 Dokumen.
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	1. Pemerintah Daerah Provinsi 2. Tim TKPKP Kabupaten Banjarnegara 3. Unsur Kecamatan 4. Tenaga Ahli Kabupaten Banjarnegara 5. Pemerintah Desa 6. Badan Kerja Sama Antar Desa 7. Badan Usaha Milik Desa Bersama 8. Pihak – pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara
3. Tahapan Aktivitas	
Pengembangan Kawasan Perdesaan	
3.1. Persiapan	
Persiapan	Bulan Januari s/d Maret Minggu 1 s/d 4
Pelaksanaan Rapat dengan TKPKP Kabupaten	Bulan Februari s/d Oktober Minggu 1 s/d 4
Sosialisasi Inisiasi dan Pendampingan Kerja Sama Desa	Bulan Februari s/d Mei Minggu 1 s/d 4
Evaluasi dan Pelaporan	Bulan Maret s/d Desember Minggu 1 s/d 4
3.2. Pelatihan Kelembagaan BKAD dalam Kawasan Perdesaan	

Persiapan	Bulan Januari s/d Maret Minggu 1 s/d 4
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan	Bulan Maret Minggu 2 s/d 3
Monitoring dan evaluasi	Bulan April s/d Desember Minggu 1 s/d 4
Pelaporan	Bulan April s/d Desember Minggu 1 s/d 4
3.3. Pelaksanaan FGD Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	
Persiapan	Bulan Januari s/d Maret Minggu 1 s/d 4
Pelaksanaan FGD	Bulan April s/d Juni Minggu 1 s/d 4
3.4. Pelaksanaan sarasehan	
Persiapan	Bulan Januari s/d Maret Minggu 1 s/d 4
Pelaksanaan FGD	Bulan April s/d Juni Minggu 1 s/d 4

4. Anggaran

Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Ket
1.	Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan	Bulan	630.000	7.560.000	
2.	Belanja/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	Paket	6.830.900	6.830.900	
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kertas dan Cover	Paket	275.000	275.000	
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Paket	3.050.700	3.050.700	
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Paket	10.000	60.000	
6.	Belanja Makan dan Minuman Rapat	Paket	35.000	18.875.000	
7.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Paket	2.450.000	24.900.000	
8.	Belanja Jasa Kebersihan	Paket	50.000	500.000	
9.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Paket	2.500.000	5.000.000	
10.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Paket	724.200	1.448.400	

11.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	Paket	375.000	31.500.000	
	Jumlah			110.000.000	

5. Lain-Lain



Penganggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara

HENDRO GAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/016/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Administrasi pemerintahan desa
Capaian Program	: Persentase Desa yang Terasilitasi Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Program	: 100%
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Hasil	: Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 266 Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 4.256 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp41.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Desa
	b. Latar belakang : Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor No 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah

	beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara 5. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomo 42 Tahun 2019 tentang Aset Desa
	c. Dilaksanakan untuk pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	d. Ruang lingkup : Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa serta pendampingan bantuan ketahanan masyarakat kepada desa.
2.2.Sasaran (Outcome)	Menigkatnya kualitas pengelolaan desa
2.3.Keluaran	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

	b. 266 dokumen				
2.5.Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	a. Dispermades Provinsi Jawa Tengah b. TA P3MD Banjarnegara.				
2.6.Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Pendampingan sistem informasi desa	Bulan Mei s.d Bulan Juni				
3.2. Pendampingan bantuan keuangan ketahanan masyarakat :					
Sosialisasi	Bulan Maret minggu pertama				
Fasilitasi pengajuan pencairan	Bulan Juni minggu ke satu s/d keempat				
Fasilitasi pertanggungjawaban	Bulan Desember				
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	ATK Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa	1 Paket	2.599.000	2.599.000	
2.	ATK Bantuan Keuangan Ketahanan Masyarakat	1 Paket	2.727.800	2.727.800	
3.	Kertas Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa	1 Paket	550.000	550.000	
4.	Kertas Bantuan Keuangan Ketahanan Masyarakat	1 Paket	440.000	440.000	
5.	Belanja Cetak Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa	1 Paket	2.811.000	2.811.000	
6.	Bantuan Keuangan Ketahanan Masyarakat	1 Paket	2.572.200	2.572.200	
7.	Belanja Benda Pos Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa	1 Paket	80.000	80.000	

8.	Belanja Benda Pos Bantuan Keuangan Ketahanan Masyarakat	1 Paket	50.000	50.000	
9.	Belanja Makan Minum Rapat Fasilitas Penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa	1 Paket	4.060.000	4.060.000	
10.	Belanja Makan Minum Rapat Bantuan Keuangan Ketahanan Masyarakat	1 Paket	5.710.000	5.710.000	
11.	Honor Narasumber/Moderator	1 Paket	11.800.000	11.800.000	
12.	Belanja Tenaga Kebersihan	1 Paket	100.000	100.000	
13.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota Fasilitas Penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa	1 Paket	75.000	6.000.000	
14.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota Bantuan Keuangan Ketahanan Masyarakat	1 Paket	75.000	1.500.000	
	JUMLAH			41.000.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Menanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara
HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/017/KAK_DISPMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Administrasi pemerintahan desa
Capaian Program	: Persentase Desa yang Terasilitasi Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Program	: 100%
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Hasil	: Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 266 Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 798 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp15.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
	b. Latar belakang : Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor No 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

	dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
	c. Dilaksanakan untuk menyusun fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
	d. Ruang lingkup : - Produk Hukum tentang Desa di Kabupaten Banjarnegara berupa Perbup/ SK Bupati tentang pengalokasian Dana Desa - Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBDesa 2024 - Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran ADD
2.2.Sasaran (Outcome)	Menigkatnya kualitas pengelolaan desa
2.3.Keluaran	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa sebanyak 100 persen.
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa

		b. 3 Produk Hukum			
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi		a. Dispermades Provinsi Jawa Tengah b. Inspektorat Kab. Banjarnegara; c. Baperlitbang Kab. Banjarnegara; d. BPPKAD Kab. Banjarnegara; e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banjarnegara; f. TA P3MD Banjarnegara.			
2.6. Lokasi		Kabupaten Banjarnegara			
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Rapat Kordinasi dan Fasilitasi dilaksanakan pada awal pertengahan, dan Akhir tahun 2023		Bulan Pebruari Minggu Pertama Bulan Mei Minggu Pertama Bulan Oktober Minggu Kedua			
3.2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran ADD		Bulan Januari minggu pertama			
3.3. Perbup/ SK Bupati tentang pengalokasian Dana Desa		Bulan Januari minggu pertama			
3.4. Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBDesa 2024		Bulan Desember minggu pertama			
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	ATK	1 Paket	683.200	683.200	
2.	Kertas	1 Paket	715.000	715.000	
3.	Cetak	1 Paket	3.031.800	3.031.800	
4.	Makan Minum Rapat	1 Tahun	10.570.000	10.570.000	
	JUMLAH			15.000.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DispermaDES PPKB
Kab. Banjarnegara

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/018/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Administrasi pemerintahan desa
Capaian Program	: Persentase Desa yang Terasilitasi Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Program	: 100%
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Hasil	: Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 266 Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 266 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp40.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA
SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
	b. Latar belakang : c. Latar belakang : 1) Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah

	dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. f. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa; 2) Gambaran Umum Singkat Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) adalah untuk mewujudkan Desa yang mandiri dan demokrasi, Mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan warga dengan mendayagunakan segala asset dan potensi yang ada di Desa. Demokrasi dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, hingga peran-peran pengawasan oleh warga, Minimnya sosialisasi terkait implementasi Undang-Undang Desa dan publikasi bagi masyarakat, menjadi salah satu faktor penyebab ketidaksiapan masyarakat untuk mengawasi dan terlibat dalam pembangunan di Desa. Undang-Undang Desa memperkenalkan 2 (dua) model pembangunan di tingkat Desa yaitu : 1. Desa membangun, dan 2. Pembangunan kawasan
--	--

	perdesaan 1. Konsep Desa membangun mewujudkan jenis-jenis pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat di lokal Desa dengan Desa lain (kawasan) yang saling beririsan. Proses membangun Desa (kawasan) dan Desa membangun keduanya harus terintegrasi dengan baik. Undang-Undang Desa memberikan ruang bagi Desa untuk mewujudkan kemandirian. Kalau dulu perencanaan Desa hanya berisi usulan ke Kabupaten, mulai saat ini perencanaan Desa harus ia laksanakan sendiri. Azaz rekognisi yang menjadi dasar pengaturan Desa artinya mengakui keragaman di Desa, termasuk cara dan nilai kearifan lokal yang di miliki setiap Desa. Azaz subsidiaritas juga memberikan ruang kepada Desa untuk semakin kreatif mengurus urusan yang skala lokal. Yang menjadi kendala adalah masih banyak yang tidak percaya kepada Desa sehingga semua Desa mau didampingi untuk implementasi Undang-Undang Desa, Desa harus memahami isi Undang-Undang Desa itu sendiri.
	g. Dilaksanakan untuk melaksanakan pendampingan kepada desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan desa
	h. Ruang lingkup : Pendampingan Musrenbangdes, penyusunan RKPDes, RPJMDes, Fasilitasi Bakeu Prov. KPMD, peningkatan Kapasitas LKD.

2.2. Sasaran (Outcome)	Meningkatnya kualitas pengelolaan desa				
2.3. Keluaran	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa sebanyak 100 persen.				
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				
	b. 266 Dokumen				
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	1. Baperlitbang Kab. Banjarnegara; 2. Dispermadesdukcapil Prov Jawa Tengah				
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Pendampingan RPJMDesa	Penyusunan	Bulan Januari Minggu 1 s/d 4 Bulan Februari Minggu 1			
3.2. Pendampingan RKPDesa	Penyusunan	Bulan Juli s/d September			
3.3. Fasilitas Permohonan Pencairan Bankeu operasional KPMD		Bulan April s/d Juni			
3.4. Fasilitas Pertanggungjawaban Operasional KPMD	Laporan Bankeu	Bulan Desember minggu 1 s/d 4			
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	ATK	1 Paket	5.695.000	5.695.000	
2.	Benda Pos	1 Paket	100.000	100.000	
3.	Bahan Komputer	1 Paket	430.000	430.000	
4.	Makan Minum Rapat	1 Tahun	33.775.000	33.775.000	
	JUMLAH			40.000.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara

HENDRO SAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/019/KAK_DISPORMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Administrasi pemerintahan desa
Capaian Program	: Persentase Desa yang Terasilitasi Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Program	: 100%
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Hasil	: Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 266 Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 266 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp3.600.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	b. Latar belakang : Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor No 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

	Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
	c. Dilaksanakan untuk pendampingan, monitoring, evaluasi serta fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	d. Ruang lingkup : - Sosialisasi di peruntukkan bagi Perwakilan Kecamatan, Pendamping Desa dan Seluruh Sekretaris Desa - Fasilitasi Jaringan Siskeudes untuk 266 Desa - Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersalurkan di 266 Desa - BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa di 266 Desa
2.2.Sasaran (Outcome)	Menigkatnya kualitas pengelolaan desa
2.3.Keluaran	- Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa sebanyak 100 persen.
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa
	b. Target Kinerja : 266 Dokumen

2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	a. Inspektorat Kab. Banjarnegara; b. Baperlitbang Kab. Banjarnegara; c. BPPKAD Kab. Banjarnegara; d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banjarnegara; e. TA P3MD Banjarnegara.				
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Rapat Kordinasi dilaksanakan pada awal pertengahan, dan Akhir tahun 2022	Bulan Pebruari Minggu Pertama Bulan Mei Minggu Pertama Bulan Oktober Minggu Kedua				
3.2. Monitoring dan Evaluasi	Bulan April Minggu ke dua – ke empat				
3.3. Siskeudes	Bulan Januari s.d Desember 2023				
3.4. Penyaluran ADD dan DD	Bulan Januari s.d Desember 2023				
3.5. Pembayaran iuran BPJS	Bulan Januari Minggu ke tiga Bulan April Minggu ke pertama Bulan Juni Minggu pertama				
3.6. Sosialisasi Penyusunan APBDes 2024	Bulan Oktober Minggu ke empat				
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total	Ket
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	1 Tahun	19.320.000	19.320.000	
2.	ATK	1 Paket	11.703.600	11.703.600	
3.	Kertas	1 Paket	1.100.000	1.100.000	
4.	Cetak	1 Paket	14.756.400	14.756.400	
5.	Benda Pos	1 Paket	120.000	120.000	
6.	Makan Minum Rapat	1 Tahun	17.850.000	17.850.000	
7.	Honor Narasumber/Moderator	1 Paket	9.150.000	9.150.000	
8.	Honor Admin Siskeudes dan Omspan	1 Tahun	5.400.000	5.400.000	
9.	Upah Tenaga Kebersihan	1 Kegiatan	600.000	600.000	

10.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12 Bulan	10.000.000	120.000.000	
11.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kades dan Perangkat Desa	1 Tahun	3.400.000.000	3.400.000.000	
	JUMLAH			3.600.000.00-	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kabupaten DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara
HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/020/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Administrasi pemerintahan desa
Capaian Program	: Persentase Desa yang Terasilitasi Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Program	: 100%
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Hasil	: Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 266 Desa
Sub Kegiatan	: Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Keluaran	: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 266 Orang
Pagu Anggaran	: Rp117.600.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
SUB KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	b. Latar belakang : Peningkatan Koordinasi dengan Kecamatan, Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat Desa baru
	c. Dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi kecamatan dan pemahaman dan pengetahuan perangkat desa
	d. Ruang lingkup : Aparatur pemerintah kecamatan dan desa
2.2. Sasaran (Outcome)	Menigkatnya kualitas pengelolaan desa
2.3. Keluaran	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa sebanyak 100 persen.
2.4. Indikator Kinerja & Target	a. Indikator Kinerja : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas

	b. Target Kinerja : 266 orang				
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	Pemerintah Kecamatan Pemerintah Desa				
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Persiapan Administrasi	Bulan Januari Minggu kedua				
3.2. Rapat Koordinasi dengan Kecamatan	Bulan Maret Minggu kesatu				
3.3. Pelaksanaan Pelatihan Dasar Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes	Gelombang I Bulan Maret Minggu kedua Gelombang II Bulan Juli Minggu Kedua				
3.4. Laporan dan Evaluasi	Bulan November Minggu ketiga				
4. Anggaran Rp 117.600.000,00					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Blj Alat/ Bahan Keg Kantor ATK	1 Paket	7.237.000	7.237.000	
2.	Blj Alat/ Bahan Keg Kantor Kertas dan Cover	1 Paket	1.100.000	1.100.000	
3.	Blj Alat/ Bahan Keg Kantor Bahan Cetak	1 Paket	7.047.800	7.047.800	
4.	Blj Alat/ Bahan Keg Kantor Benda Pos	1 Paket	100.000	100.000	
5.	Jamuan Rapat Biasa	1 Paket	12.600.000	12.600.000	
6.	Jamuan minum dan makanan kecil	1 Paket	7.500.000	7.500.000	
7.	Honorarium Narasumber	1 Paket	21.040.000	21.040.000	
8.	Sound System	1 Paket	5.221.600	5.221.600	
9.	Belanja Sewa Gedung	1 Paket	39.253.600	39.253.600	
10.	Bantuan Transport	1 Paket	16.500.000	16.500.000	
JUMLAH				117.600.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Pemangku Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Bandung

NENDRO SAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/021/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJASAMA ANTAR DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Administrasi pemerintahan desa
Capaian Program	: Jumlah BUMDes yang Berkembang
Target Kinerja Program	: 7 BUMDes
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Hasil	: Jumlah Desa yang memiliki BUMDes Aktif
Target Kinerja Kegiatan	: 125 Desa
Sub Kegiatan	: Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 50 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp106.400.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK
DIBIDANG DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT
DAERAH PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA
KERJASAMA ANTAR DESA

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2022
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	Substansi Kegiatan : Fasilitasi Pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa akan dilaksanakan secara total terhadap 266 Desa sejak proses sosialisasi, verifikasi proposal, pencairan hingga pertanggungjawaban.
	a. Latar belakang : Dasar Hukum : b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendampingan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa; c. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

	d. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana e. Gambaran Umum Singkat Fasilitasi Pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa akan dilaksanakan secara total terhadap 266 Desa sejak proses sosialisasi, verifikasi proposal, pencairan hingga pertanggungjawaban. f. Alasan Kegiatan dilaksanakan Pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa berdasarkan regulasi yang memayungi merupakan kegiatan yang mutlak dilaksanakan pada semua desa.
	a. Dilaksanakan untuk 1. Mendampingi desa dalam proses fasilitasi peningkatan sumber daya manusia pengelolaan BUMDesa. 2. Terbentuk dan terkelolanya BUMDesa secara transparan dan akuntabel.
	Ruang lingkup : - Fungsi DISPERMADES PPKB adalah mengedukasi dan memotivasi desa terkait penyiapan sumber daya manusia pengelola BUMDes, akan tetapi kewenangan sepenuhnya ada pada Pemerintah Desa. - Melakukan monitoring administrasi keuangan untuk rencana. Anggaran Belanja kegiatan diserahkan kepada UPK.
2.2. Sasaran (Outcome)	- 50 Desa yang terdiri dari 50 BUMDesa - 20 kecamatan yang terdiri dari 20 UPK Eks PNPM MPd
2.3. Keluaran	- Jumlah desa yang dilatih/terdampingi manajemen BUM Desa Terlaksananya pelatihan/pendampingan manajemen BUM Desa - Jumlah Kecamatan yang terdampingi UPKnya

2.4. Indikator & Target Kinerja	Indikator Kinerja : - Jumlah desa yang dilatih/terdampangi manajemen BUM Desa - Jumlah Kecamatan yang terdampangi UPKnya				
	Target Kinerja : - 50 Desa yang dilatih/terdampangi manajemen BUM Desa - 20 kecamatan terdampangi UPKnya				
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara Tenaga Profesional Pengelola BUM Desa				
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Tahap persiapan	Bulan Januari s/d Maret				
3.2. pelaksanaan	Bulan Mei dan Oktober				
3.3. evaluasi	Bulan September s/d November				
3.4. dst					
3.5.					
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total	Ket
	Rapat Persiapan	3	0	0	
	Pelaksanaan	2	0	Rp 136,400,000,-	
5. Lain-Lain (diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)					
 Benanggung Jawab Kepala Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara BENDRO CAHYONO, SE, M.Si NIP. 19681130 199703 1 007					



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/022/KAK_DISPMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Administrasi Pemerintahan Desa
Capaian Program	: Persentase Desa yng Terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Program	: 100%
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Hasil	: Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Admiistrasi Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 266 Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Keluaran	: Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 20 Laporan
Pagu Anggaran	: Rp15.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA
SUB KEGIATAN FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
	b. Latar belakang : Perangkat Desa yang difasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
	c. Dilaksanakan untuk Pendampingan kepada Perangkat Desa
	d. Ruang lingkup : Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa
2.2. Sasaran (Outcome)	Meningkatnya kualitas pengelolaan desa
2.3. Keluaran	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa sebanyak 100 persen

2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				
	b. Target Kinerja : 60 laporan				
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	Kecamatan, Pemerintah Desa				
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Persiapan Administrasi	Bulan Januari Minggu Pertama				
3.2. Rapat Staf Meeting	Bulan Januari Minggu Pertama				
3.3. Rapat Koordinasi Tri Wulan I	Bulan April Minggu Pertama				
3.4. Rapat Staf Meeting Tri Wulan II	Bulan Juli Minggu Pertama				
3.5. Rapat Staf Meeting Tri Wulan III	Bulan Oktober Minggu Pertama				
4. Anggaran Rp15.000.000,00					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total	Ket
1.	Alat/Bahan untuk Keg Kantor ATK	1 Paket	718.900	718.900	
2.	Alat/ Bahan Keg Kantor Kertas dan Cover	1 Paket	770.000	770.000	
3.	Alat/ Bahan Keg Kantor Bahan Cetak	1 Paket	1.661.100	1.661.100	
4.	Jamuan minum dan makanan kecil	1 Paket	1.300.000	1.300.000	
5.	Jamuan makanan dan minuman rapat	1 Paket	2.250.000	2.250.000	
6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas	1 Paket	6.800.000	6.800.000	
7.	Bantuan Transport	1 Paket	1.500.000	1.500.000	
JUMLAH				15.000.000	
5. Lain-Lain (diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)					
 Penanggung Jawab Kepala DisPERMADES PPKB Kab. Banjarnegara BALENDRO CAHYONO, SE, M.Si NIP. 19681130 199703 1 007					



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/023/KAK_DISPMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Administrasi Pemerintahan Desa
Capaian Program	: Persentase Desa yang Terasilitasi Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Program	: 100%
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Hasil	: Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 266 Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 266 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp114.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
	b. Latar belakang : Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor No 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

	dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara 5. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomo 42 Tahun 2019 tentang Aset Desa
	c. Dilaksanakan untuk pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
	d. Ruang lingkup : Pendampingan profil desa di 266 Desa se-Kabupaten Banjarnegara
2.2. Sasaran (Outcome)	Meningkatnya kualitas pengelolaan desa
2.3. Keluaran	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa sebanyak 100 persen
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Profil Desa
	b. 266 Desa
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	a. Dispermades Provinsi Jawa Tengah b. TA P3MD Banjarnegara.
2.6. Lokasi	266 desa di Kabupaten Banjarnegara

3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Rapat Kordinasi dan Fasilitasi dan Pendampingan dilaksanakan pada semester pertama			Bulan Mei minggu ke tiga sampai dengan Juni minggu ke dua		
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	ATK	1 Paket	14.260.000	14.260.00	
2.	Kertas	1 Paket	220.000	220.00	
3.	Cetak dan pengadaan	1 Paket	17.670.000	17.670.000	
4.	Makan Minum Rapat	1 Tahun	21.350.000	21.350.000	
5.	Honor Narasumber/Moderator	1 Paket	17.000.000	17.000.000	
6.	Belanja Tenaga Kebersihan	10 OK	50.000	500.000	
7.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	572 OK	75.000	42.900.000	
	JUMLAH			114.000.000	
5. Lain-Lain (diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)					
 Penanggung Jawab Kepala Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara <i>[Signature]</i> HENDRO CAHYONO, SE, M.Si NIP. 19681130 199703 1 007					



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/024/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Administrasi Pemerintahan Desa
Capaian Program	: Persentase Desa yang Terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Program	: 100%
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Hasil	: Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 266 Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 266 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp23.900.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
	b. Latar belakang : Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor No 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

	dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara 5. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomo 42 Tahun 2019 tentang Aset Desa
	c. Dilaksanakan untuk menyusun kegiatan fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
	d. Ruang lingkup : Aset Desa di Kabupaten Banjarnegara
2.2. Sasaran (Outcome)	Meningkatnya kualitas pengelolaan desa
2.3. Keluaran	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa sebanyak 100 persen.
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa
	b. 4 Dokumen Permasalahan Aset Desa

2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	a. Dispermades Provinsi Jawa Tengah b. Inspektorat Kab. Banjarnegara; c. BPPKAD Kab. Banjarnegara; d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banjarnegara; e. TA P3MD Banjarnegara.																																																
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara																																																
3. Tahapan Aktivitas																																																	
3.1. Rapat Kordinasi dan Fasilitasi dilaksanakan pada awal pertengahan, dan Akhir tahun 2023	Bulan Januari sampai Desember																																																
4. Anggaran																																																	
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahapan Aktivitas</th> <th>Satuan Volume</th> <th>Harga Satuan</th> <th>Total (Rp)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ATK</td> <td>1 Paket</td> <td>390.000</td> <td>390.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kertas</td> <td>1 Paket</td> <td>660.000</td> <td>660.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cetak</td> <td>1 Paket</td> <td>5.208.000</td> <td>5.208.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Makan Minum Rapat</td> <td>1 Tahun</td> <td>8.750.000</td> <td>8.750.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Honor Narasumber/Moderator</td> <td>1 Paket</td> <td>3.400.000</td> <td>3.400.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota</td> <td>40 OK</td> <td>75.000</td> <td>75.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">JUMLAH</td> <td></td> <td>23.900.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket	1.	ATK	1 Paket	390.000	390.000		2.	Kertas	1 Paket	660.000	660.000		3.	Cetak	1 Paket	5.208.000	5.208.000		4.	Makan Minum Rapat	1 Tahun	8.750.000	8.750.000		5.	Honor Narasumber/Moderator	1 Paket	3.400.000	3.400.000		6.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	40 OK	75.000	75.000		JUMLAH				23.900.000	
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket																																												
1.	ATK	1 Paket	390.000	390.000																																													
2.	Kertas	1 Paket	660.000	660.000																																													
3.	Cetak	1 Paket	5.208.000	5.208.000																																													
4.	Makan Minum Rapat	1 Tahun	8.750.000	8.750.000																																													
5.	Honor Narasumber/Moderator	1 Paket	3.400.000	3.400.000																																													
6.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	40 OK	75.000	75.000																																													
JUMLAH				23.900.000																																													
5. Lain-Lain (diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)																																																	
 Bertanggung Jawab Kepala Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara HENDRO GANYONO, SE, M.Si NIP. 19881130 199703 1 007																																																	



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/025/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Administrasi Pemerintahan Desa
Capaian Program	: Persentase Desa yang Terasilitasi Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Program	: 100%
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Hasil	: Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 266 Desa
Sub Kegiatan	: Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
Keluaran	: Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 50 Orang
Pagu Anggaran	: Rp305.300.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA
SUB KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2022
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
	b. Latar belakang : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat Desa dan Anggota BPD
	c. Dilaksanakan untuk Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat Desa dan Anggota BPD
	d. Ruang lingkup : Perangkat Desa dan Anggota BPD
2.2. Sasaran (Outcome)	Menigkatnya kualitas pengelolaan desa
2.3. Keluaran	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa sebanyak 100 persen.
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
	b. Target Kinerja : 8266 orang

2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	Pemerintahan Desa				
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Rapat Persiapan	Bulan Maret Minggu ketiga				
3.2. Rakor BPD Lama	Bulan Maret Minggu keempat				
3.3. Bimtek Peningkatan Kapasitas	Bulan Juli Minggu pertama				
3.4. Rapat evaluasi	Bulan Oktober Minggu kedua				
4. Anggaran Rp305.300.000,00					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total	Ket
1.	Alat/ Bahan Kantor	1 Paket	27.421.200	27.421.200	
2.	Alat/ Bahan Keg Kantor Kertas dan Cover	1 Paket	1.100.000	1.100.000	
3.	Alat/ Bahan Keg Kantor Bahan Cetak	1 Paket	4.229.600	4.229.600	
4.	Alat/ Bahan Keg Kantor Benda Pos	1 Paket	210.000	210.000	
5.	Jamuan makan biasa	1 Paket	33.550.000	33.550.000	
6.	Jamuan minum dan makanan kecil	1 Paket	18.810.000	18.810.000	
7.	Honorarium Moderator	1 Paket	13.050.000	13.050.000	
8.	Honorarium Narasumber	1 Paket	30.730.000	30.730.000	
9.	Belanja Sewa Sound System	1 Paket	11.748.600	11.748.600	
10.	Belanja Sewa Bangunan Gedung	1 Paket	100.090.600	100.090.600	
11.	Bantuan Transport	1 Paket	64.350.000	64.350.000	
Jumlah				305.300.000	
5. Lain-Lain (diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)					
 Penanggung Jawab Kepala DISPERMADES PPKB Kab. Banjarnegara HENDRO CAHYONO, SE, M.Si NIP. 19681130 199703 1 007					



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/026/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Administrasi Pemerintahan Desa
Capaian Program	: Persentase Desa yang Terfasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Target Kinerja Program	: 50%
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Hasil	: Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 133 Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Keluaran	: Jumlah Desa yang Dilatih dan Didampingi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 45 Desa
Pagu Anggaran	: Rp160.900.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA
SUB KEGIATAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2022
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : pelaksanaan penetapan batas secara definitif dengan Peraturan Kepala Daerah, yang secara teknis telah ditetapkan dalam Permendagri 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.
	b. Latar belakang : Bahwa kebijakan satu peta merupakan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang harus segera dilaksanakan. Hal ini mengingat pentingnya urgensinya indikator penentuan standar peta wilayah yang menyangkut batas wilayah baik pada level pusat, provinsi, kabupaten maupun wilayah desa/kelurahan, dimana ketidakjelasan batas wilayah merupakan salah satu potensi konflik di masyarakat, baik masyarakat adat maupun masyarakat modern termasuk dunia usaha pada proses perizinan maupun ranah hukum dan lainnya.

	Batas Wilayah secara administratif telah ada secara turun temurun, namun demikian karena berbagai factor, seperti kondisi alam, batas tersebut sering kali menjadi tidak jelas, bergeser dan berpindah, sehingga terkadang menimbulkan adanya duplikasi pada perizinan maupun konflik di masyarakat yang tidak sederhana, dan terkadang apabila tidak dapat segera terselesaikan dapat menjadi pemicu arogansi massa yang berimbas negative ke semua lini kehidupan. Dengan kebijakan One Map Policy, Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk melakukan percepatan-percepatan guna pelaksanaan penetapan batas secara definitif dengan Peraturan Kepala Daerah, yang secara teknis telah ditetapkan dalam Permendagri 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.
	c. Dilaksanakan untuk perepatan penetapan batas secara definitif dengan Peraturan Kepala Daerah.
	d. Ruang lingkup : Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Banjarnegara
2.2.Sasaran (Outcome)	Menigkatnya kualitas pengelolaan desa
2.3.Keluaran	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa sebanyak 100 persen.
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
	b. Target Kinerja : 190 desa
2.5.Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	Pemerintahan Desa
2.6.Lokasi	Kabupaten Banjarnegara
3. Tahapan Aktivitas	
3.1. Penelitian/Penggunaan dokumen batas	Bulan Januari s.d Maret 2023
3.2.Pelacakan batas desa	Bulan April s.d Juni 2023
3.3.Pemasangan pilar batas	Bulan Juli s.d Agustus 2023

3.4. Pengukuran dan Penentuan Posisi Garis Batas Desa	Bulan September 2023				
3.5. Pembuatan Peta Desa	Bulan Oktober - November 2023				
3.6. Pelaporan	Bulan Desember 2023				
4. Anggaran Rp305.300.000,00					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total	Ket
1.	Alat/ Bahan Kantor	1 Paket	2.582.500	3.431.500	
2.	Alat/ Bahan Keg Kantor Kertas dan Cover	1 Paket	1.100.000	1.100.000	
3.	Alat/ Bahan Keg Kantor Bahan Cetak	1 Paket	829.500	829.500	
4.	Alat/ Bahan Keg Kantor Benda Pos	1 Paket	130.000	130.000	
5.	Jasa Konsultasi	12 Paket	10.000.000	120.000.000	
6.	Jamuan makan minum rapat biasa	1 Paket	29.330.000	29.330.000	
7.	Komponen Rambu – rambu lainnya	1 Paket	6.128.000	5.733.000	
8.	Upah kebersihan	1 Paket	800.000	30.730.000	
JUMLAH				160.900.000	
5. Lain-Lain (diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)					
 Penanggung Jawab Kepala DISPERMADES PPKB Kab. Banjarnegara HENDRO CAHYONO, SE, M.Si NIP. 19681130 199703 1 007					



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/027/KAK_DISPORMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Administrasi Pemerintahan Desa
Capaian Program	: Persentase Desa yang Terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Program	: 100%
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Hasil	: Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 266 Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 266 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp50.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

SUB KEGIATAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Evaluasi Perkembangan Desa (Lomba Desa)
	b. Latar belakang : Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor No 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah

	beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara 5. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomo 42 Tahun 2019 tentang Aset Desa
	c. Dilaksanakan untuk pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa
	d. Ruang lingkup : 266 Desa di Kabupaten Banjarnegara
2.2.Sasaran (Outcome)	Meningkatnya kualitas pengelolaan desa
2.3.Keluaran	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa sebanyak 100 persen.
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
	b. 3 Dokumen

2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	a. Dispermades Provinsi Jawa Tengah b. Dinkes Kab. Banjarnegara; c. Dindikpora Kab. Banjarnegara; d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banjarnegara; e. TA P3MD Banjarnegara.				
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Rapat Kordinasi dan Fasilitasi dilaksanakan pada awal pertengahan, dan Akhir tahun 2023	Bulan Januari sampai Desember (Menunggu ketentuan dari Propinsi)				
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total	Ket
1.	ATK	1 Paket	430.000	430.000	
2.	Kertas	1 Paket	440.000	440.000	
3.	Cetak dan pengadaan	1 Paket	3.780.000	3.780.000	
4.	Makan Minum Rapat	1 Tahun	19.600.000	19.600.000	
5.	Juri Lomba	1 Keg	2.250.000	2.250.000	
6.	Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan	1 Set	23.500.000	23.500.000	
	JUMLAH			50.000.000	
5. Lain-Lain (diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)					
 Penanggung Jawab Kepala Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara <i>[Signature]</i> HENDRO CAHYONO, SE, M.Si NIP. 19681130 199703 1 007					



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/028/KAK_DISPMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Capaian Program	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Aktif dalam Program Pemberdayaan Masyarakat
Target Kinerja Program	: 45%
Kegiatan	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Desa Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Hasil	: Persentase lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Aktif dalam Perencanaan Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 55%
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 266 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp75.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT,
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK
DIBIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN
KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW,
PKK, POSYANDU, LPM DAN KARANGTARUNA), LEMBAGA ADAT
DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	b. Latar belakang : 1) Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

	Negara Republik Indonesia Nomor 5495); b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; e. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa; 2) Gambaran Umum Singkat Perencanaan pembangunan masyarakat desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan nasional, karena sebagai system perencanaan pembangunan. Paradigma pembangunan nasional akan menjadi tumpuan dan dasar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan masyarakat desa. Lembaga Perencana
--	--

	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. Pembentukan LP3M diharapkan mampu untuk merealisasikan perencanaan pembangunan yang diawali dengan penggalan gagasan di tingkat paling bawah tingkat dusun, penyusunan rancangan RPJMDes dan rancangan RKPDDes. Lembaga Perencana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LP3M, berkedudukan di Desa, dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisatoris berdiri sendiri. LP3M dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Fungsi LP3M diantaranya sebagai wadah dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, untuk penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif serta penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat juga menggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta kesesuaian lingkungan hidup. Seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 94 dan pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 150 tentang tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa. Berangkat dari pola Lembaga antara
--	---

	lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa adalah kemitraan, konsultatif dan koordinatif
	c. Dilaksanakan untuk - Terlatihnya pengurus Lembaga Perencana Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat - Terfasilitasi Koordinasi Pokjanal Kecamatan dan Kabupaten - Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu yang lebih baik - Meningkatnya Strata Posyandu - Kader berprestasi terpilih
	d. Ruang lingkup : LPMD/LP3M, Posyandu, Kader
2.2. Sasaran (Outcome)	- Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
2.3. Keluaran	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat sebanyak 45 persen.
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	b. Target Kinerja : - 2 DOKumen
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	Baperlitbang, TA, LP3M Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masy Hukum Adat Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara

9.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1 Paket	12.000.000	12.000.000	
810.	Belanja Hadiah	1 Paket	19.000.000	19.000.000	
	Jumlah			75.000.000	

5. Lain-Lain

(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)

Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara



HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/029/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Capaian Program	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Aktif dalam Program Pemberdayaan Masyarakat
Target Kinerja Program	: 45%
Kegiatan	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Desa Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Hasil	: Persentase lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Aktif dalam Perencanaan Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 55%
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat
Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 25 Lembaga
Pagu Anggaran	: Rp77.400.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG
BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT
TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM
DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM DAN
KARANGTARUNA0. LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	b. Latar belakang : 1) Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

	Indonesia Nomor 5495); b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; e. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa; 2) Gambaran Umum Singkat Perencanaan pembangunan masyarakat desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan nasional, karena sebagai system perencanaan pembangunan. Paradigma pembangunan nasional akan menjadi tumpuan dan dasar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan masyarakat desa. Lembaga Perencana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
--	--

	Pembentukan LP3M diharapkan mampu untuk merealisasikan perencanaan pembangunan yang diawali dengan penggalian gagasan di tingkat paling bawah tingkat dusun, penyusunan rancangan RPJMDes dan rancangan RKPDes. Lembaga Perencana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LP3M, berkedudukan di Desa, dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisatoris berdiri sendiri. LP3M dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Fungsi LP3M diantaranya sebagai wadah dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, untuk penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif serta penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat juga menggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta kesesuaian lingkungan hidup. Seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 94 dan pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 150 tentang tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa. Berangkat dari pola Lembaga antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa adalah kemitraan, konsultatif dan koordinatif
	c. Dilaksanakan untuk - melaksanakan pendampingan kepada desa dalam proses perencanaan, pembangunan di Desa - Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik terkait

	dengan pengelolaan air Minum
	d. Ruang lingkup : LPMD/LP3M, BPSPAM
2.2.Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
2.3.Keluaran	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat sebanyak 45 persen.
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
	b. Target Kinerja : - 25 Pengurus LPMD/LP3M - 30 Pengurus BPSPAM
2.5.Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	1. Baperlitbang Kab. Banjarnegara; 2. DPUPR Kab. Banjarnegara; 3. Tenaga Ahli Desa.
2.6.Lokasi	Kabupaten Banjarnegara
3. Tahapan Aktivitas	
3.1.Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus LPMD/LP3M	Bulan Februari Minggu 3
3.2.Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pengurus LPMD/LP3M	Bulan Maret Minggu 4
3.3.Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan BP SPAM	Bulan Januari s/d Juni Minggu 1 s/d 4
3.4.Pelaksanaan Rakor Kelembagaan BPSPAM	Bulan Agustus s/d September Minggu 1s/d 4
3.5.Pelaporan	Bulan November s/d Desember Minggu 1 s/d 4
4. Anggaran Rp77.400.000,00	
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara	

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 paket	6.302.400,00	6.302.400,00	
2.	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1 paket	385.000,00	385.000,00	
3.	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1 paket	4.317.600,00	4.317.600,00	
4.	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1 paket	645.000,00	645.000,00	
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 paket	19.800.000,00	19.800.000,00	
6.	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1 paket	14.800.000,00	14.800.000,00	
7.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25 OK	31.150.000,00	31.150.000,00	
	Jumlah			77.400.000,00	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)


 Penanggung Jawab
 Kepala DisPERMADES PPKB
 Kab. Banjarnegara
HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
 NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/030/KAK_DISPORMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Capaian Program	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Aktif dalam Program Pemberdayaan Masyarakat
Target Kinerja Program	: 45%
Kegiatan	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Desa Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Hasil	: Persentase Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Target Kinerja Kegiatan	: 5%
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 7 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp50.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT,
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG
BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT
TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM
DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENINGKATAN ASLI DESA
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	b. Latar belakang : Dasar Hukum : 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa 2) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

	3) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gambaran Umum Singkat Fasilitasi Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa sejak beberapa tahun yang lalu ternyata dinilai kurang efektif karena tidak secara merata dilaksanakan pendampingan. Untuk tahun berikutnya, akan dilaksanakan secara total terhadap 266 Desa sehingga akan terseleksi desa-desa yang masih dalam proses pembentukan dan pengelolaan pasar desa. Alasan Kegiatan dilaksanakan Lembaga Ekonomi Masyarakat merupakan kelembagaan yang sangat urgent untuk difasilitasi dan diperkuat kapasitasnya.
	Dilaksanakan untuk 1) Mendampingi desa dalam proses fasilitasi pembentukan dan pengelolaan Pasar Desa. 2) Terwujudnya petugas pengelola pasar desa yang profesional.
	c. Ruang lingkup : Fungsi DISPERMADES PPKB adalah mengedukasi dan memotivasi desa terkait pembentukan Pasar Desa, akan tetapi kewenangan sepenuhnya ada pada Pemerintah Desa.
2.2. Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
2.3. Keluaran	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat sebanyak 45 persen.

2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				
	b. Target Kinerja : - 14 Dokumen				
2.5.Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	P3MD Provinsi Jawa Tengah P3MD Kabupaten Banjarnegara Tenaga Profesional Pengelola Pasar Desa				
2.6.Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Tahap persiapan	Bulan Januari s/d Maret				
3.2. pelaksanaan	Bulan Mei dan Juni				
3.3. evaluasi	Bulan Juli s/d September				
4. Anggaran Rp50.000.000,00					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	4 paket	1.310.000	5.240.000	
2.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1 Paket	6.536.900	6.536.900	
3.	Belanja Kertas - Cover	1 Paket	625.000	625.000	
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan/Foto Copy	1 paket	1.934.100	1.934.100	
5.	Belanja Bahan Komputer	1 Paket	1.344.000	1.344.000	
6.	Belanja Makan dan Minum Rapat	1 paket	22.120.000	1.934.100	
7.	Belanja Narasumber	1 Paket	2.900.000	2.900.000	
8.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1 Paket	6.600.000	6.600.000	
9.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1 Paket	2.700.000	2.700.000	
	Jumlah			50.000.000,00	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara

HENDRO CAHYONO, SE, M.SI
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/032/KAK_DISPERSMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Capaian Program	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Aktif dalam Program Pemberdayaan Masyarakat
Target Kinerja Program	: 45%
Kegiatan	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Desa Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Hasil	: Persentase lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Aktif dalam Perencanaan Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 55%
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 266 Laporan
Pagu Anggaran	: Rp15.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT,
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG
 BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT
 TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM
 ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM
 DAERAH KABUPATEN/KOTA
 SUB FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN
 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
	a. Latar belakang : 1) Dasar Hukum a) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah

	dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. e) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Provinsi Jawa Tengah; 2) Gambaran Umum Singkat Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan menjadi bagian dari sistem budaya Indonesia. Kita telah mengetahui bahwa modernisasi dan globalisasi melahirkan corak kehidupan yang sangat kompleks, hal ini seharusnya jangan sampai membuat bangsa Indonesia kehilangan jatidiri sebagai bangsa yang kaya akan unsur budaya. Gotong Royong merupakan kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat
--	---

serta peran aktif (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan.

Gotong Royong selain memiliki nilai historis yang mendalam dalam kehidupan manusia khususnya bagi bangsa Indonesia juga gotong royong memiliki nilai politis dan strategis dalam proses manajemen, tidak hanya yang terjadi dalam masyarakat Desa/Kelurahan saja tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Gotong royong perlu dimulai dari lingkup yang paling terkecil yaitu sebuah keluarga, dengan melaksanakan kegiatan – kegiatan secara gotong royong maka beban keluarga akan menjadi ringan, semua kegiatan dapat dilaksanakan oleh anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan sehingga akan terjalin suatu komunikasi yang efektif antar keluarga dan saling koordinasi yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini dapat menghasilkan suatu keharmonisan keluarga yang didambakan oleh setiap anggota untuk melangkah ke jenjang yang lebih luas yaitu lingkup masyarakat .Prinsip gotong royong dalam pembangunan merupakan paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Dengan semangat pemberdayaan masyarakat melalui gotong royong (secara sosial budaya, politik dan kenegaraan) bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari dominasi bangsa asing. Gotong royong merupakan kekayaan adat istiadat dan inti modal suatu bangsa yang didalamnya terkandung nilai – nilai komposit sosial budaya dari berbagai sub kultur masyarakat yang tersebar di seluruh Nusantara. Revitalisasi nilai melalui pemberdayaan kelembagaan gotong royong pada masyarakat

	akan membentuk kekuatan sinergis dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat melalui gotong – royong tidak hanya dipandang sebagai bahan baku utama membangun kemandirian bangsa Indonesia, melainkan juga sebagai faktor esensial untuk mewujudkan konstitusi bangsa Indonesia berbasis kekuatan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat.
	b. Dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan kegiatan Gotong Rorong sebagai kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peran aktif (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan
	c. Ruang lingkup : Pemda, Pmdes, Swasta dan Masyarakat
2.2. Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
2.3. Keluaran	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat sebanyak 45 persen.
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
	b. Target Kinerja : 1 laporan
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	OPD, Swasta dan Masyarakat
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara
3. Tahapan Aktivitas	
3.1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Bulan Maret Minggu 1 s/d 4
3.2. Pelaksanaan Kegiatan BBGRM	Bulan Maret Minggu 1 s/d 4
4. Anggaran Rp15.000.000,00	

Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total	Ket
1.	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 paket	Rp222.600,00	Rp222.600,00	
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan cover	1 paket	Rp55.000,00	Rp55.000,00	
3.	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1 paket	Rp1.667.400,00	Rp1.667.400,00	
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	273 dus	Rp9.555.000,00	Rp9.555.000,00	
5.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1 paket	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	
6.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat pertemuan	1 paket	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	
	Jumlah			Rp15.000.000,00	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/033/KAK_DISPMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Capaian Program	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Aktif dalam Program Pemberdayaan Masyarakat
Target Kinerja Program	: 45%
Kegiatan	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Desa Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Hasil	: Persentase lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Aktif dalam Perencanaan Desa
Target Kinerja Kegiatan	: 55%
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Desa
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Desa
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 36 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp227.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT,
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KEGIATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG
BERGERAK DIBIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM
DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM
PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
2.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
2.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
2.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1.Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	b. Latar belakang : 1) Dasar Hukum a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 35);

	b) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; d) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.4-3514 Tahun 2016 tanggal 06 April 2016 tentang Hasil Pengesahan Rakernas VIII PKK Tahun 2015. e) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; f) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 72); g) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 61); h) Peraturan Bupati No. 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2) Gambaran Umum Singkat Dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Gerakan PKK maka setiap tahun Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjarnegara menyusun Program Kerja yang berpedoman pada hasil Rakernas VIII Tahun 2015. Gerakan dalam pembangunan masyarakat, yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender,
--	--

	serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dalam setiap aktifitas gerakanya, gerakan pkk melalui pembinaan dan pemberdayaan keluarga, sehingga dalam pelaksanaannya keluarga sebagai institusi terkecil dan utama dalam pembangunan PKK yang memiliki peran strategis dalam kepemilikan program maupun kebersamaan program kemitraan untuk mendukung program pemerintah. Tim Penggerak PKK sebagai pengelola Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga dalam mendukung pembangunan, memiliki kader dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa/kelurahan dan kelompok dasa wisma. Kader sebagai kader pembangunan, menjadi motivator yang tangguh untuk menyampaikan pesan pembangunan dan menggerakkan keluarga agar mau melaksanakan 10 program pokok PKK serta mencatat data dan kegiatan warga yang dapat dijadikan data akurat dalam sistem informasi Manajemen SIM PKK. Penguatan keluarga dalam berbagai bidang pada akhirnya dapat mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin. Melalui Peran aktif masyarakat dalam gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga akan mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera.
	c. Dilaksanakan untuk Meningkatkan tingkat pemahaman pengurus PKK tentang 10 Program Pokok PKK
	d. Ruang lingkup : PKK Kabupaten, PKK Kecamatan dan PKK Desa
2.2.Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
2.3.Keluaran	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat sebanyak 45 persen.
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

	b. Target Kinerja : 56 Dokumen (20 TP. PKK Kecamatan dan 36 TP. PKK Desa / Kelurahan)
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	Dinas Kesehatan Kabupaten, Dindikpora, Disperindagkop dan UMKM, Distankan
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara
3. Tahapan Aktivitas	
3.1. Rapat Pengurus	Bulan Januari Minggu 2
3.2. Rapat Pleno	Bulan Januari Minggu 4
3.3. Pembinaan Wilayah	Bulan Februari Minggu 1 - 4
3.4. Pembinaan Wilayah	Bulan Maret Minggu 1 - 4
3.5. Pembinaan Wilayah	Bulan April Minggu 1 - 4
3.6. Pembinaan Wilayah	Bulan Mei Minggu 1 - 4
3.7. Rapat Pengurus	Bulan Mei Minggu 2
3.8. Rapat Pleno	Bulan Mei Minggu 4
3.9. Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus TP. PKK Kabupaten Banjarnegara	Bulan Juni Minggu 2
3.10. Rapat Penentuan Nominasi Lomba – Lomba PKK	Bulan Juni Minggu 3
3.11. Kunjungan Nominasi program Pokok PKK	Bulan Juli Minggu 1- 4
3.12. Kunjungan Nominasi program Pokok PKK	Bulan September Minggu 1-4
3.13. Peningkatan Kapasitas Sekretaris dan Bendahara TP. PKK Kecamatan	Bulan September Minggu 4
3.14. Peningkatan Kapasitas PKK Desa Karanganyar	Bulan Oktober Minggu 1
3.15. Rapat Pengurus	Bulan Oktober Minggu 2
3.16. Rapat Penentuan Kejuaraan Lomba – Lomba PKK	Bulan Oktober Minggu 3
3.17. Rapat Pleno dan Pembagian Hadiah Lomba	Bulan Oktober Minggu 4

3.18. Pelaporan kegiatan ke PKK provinsi		Bulan November – Desember Minggu 1			
4. Anggaran Rp227.000.000,00					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor ATK	1 Paket	14.941.200	14.941.200	
2.	Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – kertas dan cover	1 Paket	3.025.000	3.025.000	
3.	Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor kantor – bahan cetak	1 Paket	7.768.000	7.768.000	
4.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1 Paket	1.075.000	1.075.000	
5.	Belanja makanan dan minuman rapat	1 Paket	111.700.000	111.700.000	
6.	Belanja Pakaian Batik tradisional	1 Paket	12.000.000	12.000.000	
7.	Belanja Honorarium atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	1 Paket	5.840.000	5.840.000	
8.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1 Paket	1.000.000	1.000.000	
9.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1 Paket	14.000.000	14.000.000	
10.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1 Paket	17.000.000	17.000.000	
11.	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	1 Paket	38.650.000	38.650.000	
	Jumlah			227.000.000	
5. Lain-Lain					
 Penanggung Jawab Kepala DisPERMADES PPKB Kab. Banjarnegara HENDRO CAHYONO, SE, M.Si NIP. 19681130 199703 1 007					



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/034/KAK_DISPMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pengendalian Penduduk
Capaian Program	: Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan
Target Kinerja Program	: 2 Dokumen
Kegiatan	: Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Hasil	: Jumlah Sektor/Instansi Yang Terlibat Dalam Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Target Kinerja Kegiatan	: 6 Sektor
Sub Kegiatan	: Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Dan Nonformal
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 2 Laporan
Pagu Anggaran	: Rp25.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
KEGIATAN PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM
RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS KEPENDUDUKAN
SUB KEGIATAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR
PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
1.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
1.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
1.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
1.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Peningkatan pengelolaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)
	b. Latar belakang : pentingnya Implementasi pendidikan kependudukan di Sekolah Siaga Kependudukan
	c. Dilaksanakan untuk terlaksananya proses KIE Program KBPK bagi anak sekolah di Sekolah Siaga Kependudukan
	d. Ruang lingkup : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

2.2.Sasaran (Outcome)	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan				
2.3.Keluaran	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan sebanyak 2 dokumen				
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal				
	b. Target Kinerja : 2 Laporan				
2.5.Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)				
2.6.Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Belanja alat/bahan kegiatan kantor - ATK	Bulan januari s/d Desember Minggu pertama				
3.2. Belanja makan dan minum rapat	Bulan maret s/d Juni Minggu pertama Kedua dan Ketiga				
3.3. Belanja honor fasilitator	Bulan maret s/d Juni Minggu pertama Kedua dan Ketiga				
3.4. Belanja hibah kepada masyarakat	Bulan maret s/d Juni Minggu pertama Kedua dan Ketiga				
4. Anggaran					
Sumber Dana : DAU					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total	Ket
1	Belanja alat/bahan kegiatan kantor – ATK (foto copy)	298 lbr	300	89.400	
2	Belanja makan dan minum rapat	140 dus	35.000	4.900.000	
3	Belanja honor fasilitator	18 OK	450.000	8.100.000	
4	Belanja hibah kepada masyarakat	2 bh	2.916.000	5.832.000	
		2 bh	2.831.000	5.662.000	
		2 bh	208.300	416.600	
	JUMLAH			25.000.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DisPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara

HENDRO GAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/035/KAK_DISPMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PERUMUSAN PARAMETER KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pengendalian Penduduk
Capaian Program	: Cakupan Penyediaan Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan
Target Kinerja Program	: 100%
Kegiatan	: Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Hasil	: Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Target Kinerja Kegiatan	: 5 Dokumen
Sub Kegiatan	: Perumusan Parameter Kependudukan
Keluaran	: Jumlah Laporan Perumusan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 1 Laporan
Pagu Anggaran	: Rp45.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
KEGIATAN PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PERUMUSAN PARAMETER KEPENDUDUKAN
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
1.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
1.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
1.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
1.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Peningkatan kualitas data Program KKBPK
	b. Latar belakang : pentingnya kualitas data Program KKBPK sebagai bahan perencanaan, pelaporan dan evaluasi program
	c. Dilaksanakan untuk terlaksananya pengelolaan data Program KKBPK
	d. Ruang lingkup : Penyediaan data program KKBPK Tahun Anggaran 2023.
2.2. Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pengendalian Penduduk
2.3. Keluaran	Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan sebanyak 100 persen.
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan

		b. Target Kinerja : 1 Dokumen			
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi		Balai Penyuluhan KKBPK			
2.6. Lokasi		Kabupaten Banjarnegara			
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Belanja alat/bahan kegiatan kantor - ATK		Bulan januari s/d Desember Minggu pertama			
3.2. Belanja alat/bahan kegiatan kantor – kertas HVS		Bulan januari s/d Desember Minggu pertama			
3.3. Belanja alat/bahan kegiatan kantor – bahan cetak		Bulan januari s/d Desember Minggu keempat			
3.4. Belanja makan minum rapat		Bulan juli s/d Desember Minggu pertama s/d keempat			
3.5. Belanja narasumber		Bulan juli s/d Desember Minggu pertama s/d keempat			
3.6. Belanja transport peserta rapat		Bulan juli s/d Desember Minggu pertama s/d keempat			
4. Anggaran					
Sumber Dana : DAU					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1	Belanja alat/bahan kegiatan kantor – ATK	1 Paket	665.900	665.900	
2	Belanja alat/bahan kegiatan kantor – kertas HVS	1 Paket	220.000	220.000	
3	Belanja alat/bahan kegiatan kantor – bahan cetak	1 Paket	17.864.100	17.864.100	
4	Belanja makan minum rapat	1 Paket	6.125.000	6.125.000	
5	Belanja narasumber	1 Paket	7.000.000	7.000.000	
6	Belanja transport peserta rapat	1 Paket	13.125.000	13.125.000	
	JUMLAH			45.000.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/036/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PROMOSI DAN KIE PROGRAM KKBPK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pembinaan Keluarga Berencana
Capaian Program	: Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49
Target Kinerja Program	: 76.59%
Kegiatan	: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Hasil	: Cakupan Wilayah yang Terinterfensi Program Bangsa Kencana
Target Kinerja Kegiatan	: 100%
Sub Kegiatan	: Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 35 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp50.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN
EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN LOKAL
SUB KEGIATAN PROMOSI DAN KIE PROGRAM KKBPK MELALUI MEDIA CETAK,
ELEKTRONIK DAN MEDIA LUAR RUANG
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
1.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
1.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
1.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
1.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Penyediaan informasi Program KKBPK melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang
	b. Latar belakang : pentingnya sarana/media untuk menyampaikan pesan Program KKBPK dan percepatan penurunan stunting
	c. Dilaksanakan untuk tersedianya sarana/media untuk menyampaikan pesan Program KKBPK dan percepatan penurunan stunting
	d. Ruang lingkup : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

2.2.Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana				
2.3.Keluaran	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 sebanyak 76,59 persen.				
2.4.Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				
	b. Target Kinerja : 3 Dokumen				
2.5.Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara				
2.6.Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3. Tahapan Aktivitas					
3.1. Belanja alat/bahan kegiatan kantor – Bahan cetak	Bulan Maret Minggu Pertama				
3.2. Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan	Bulan Juni dan Agustus Minggu kedua				
3.3. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan – pemeliharaan baligo	Bulan januari s/d Desember Minggu pertama s/d keempat				
4. Anggaran					
Sumber Dana : DAK Non Fisik BOKB					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1	Belanja alat/bahan kegiatan kantor – Bahan cetak (Kalenfder)	400 bh	30.000	12.000.000	
2	Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan (Mural)	120 bh	100.000	12.000.000	
3	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan – pemeliharaan baligo	52 m2	500.000	26.000.000	
	JUMLAH			50.000.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)

Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara



HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/037/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pembinaan Keluarga Berencana
Capaian Program	: Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49
Target Kinerja Program	: 76.59%
Kegiatan	: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLB/PLKB)
Hasil	: Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk
Target Kinerja Kegiatan	: 100%
Sub Kegiatan	: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 1.593 Orang
Pagu Anggaran	: Rp15.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
KEGIATAN PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN
KB (PKB/PLKB)
SUB KEGIATAN PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN
(IMP)
TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
1.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
1.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
1.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
1.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : KIE yang dilakukan oleh IMP
	b. Latar belakang : Dengan semakin berkurangnya jumlah Penyuluh KB (PKB), maka peran IMP dalam melakukan KIE Program KKBPK dipandang penting
	c. Dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas KIE Program KKBPK
	d. Ruang lingkup : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
2.2. Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana

2.3. Keluaran	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi sebanyak 30,65 persen.
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	b. Target Kinerja : 1.593 IMP
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara

3. Tahapan Aktivitas

3.1. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	Bulan Maret Minggu pertama
3.2. Belanja alat/bahan kegiatan kantor – ATK	Bulan Maret Minggu pertama
3.3. Belanja alat/bahan kegiatan kantor – Kertas dan cover	Bulan Maret Minggu pertama
3.4. Belanja makan minum rapat	Bulan Maret s/d Juni Minggu pertama s/d keempat
3.5. Belanja narasumber	Bulan Maret s/d Juni Minggu pertama s/d keempat
3.6. Belanja transportasi peserta	Bulan Maret s/d Juni Minggu pertama s/d keempat

4. Anggaran

Sumber Dana : DAK Non Fisik BOKB

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total	Ket
1.	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	1 org 1 org	125.000 505.000	630.000	
2.	Belanja alat/bahan kegiatan kantor – ATK	1 Paket	350.000	350.000	
3.	Belanja alat/bahan kegiatan kantor – Kertas dan cover	4 rim	55.000	220.000	
4.	Belanja makan minum rapat	120 dus	35.000	4.200.000	

5.	Belanja narasumber	8 oj	450.000	3.600.000	
6.	Belanja transporat peserta	120 ok	50.000	6.000.000	
	JUMLAH			15.000.000	

5. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DisPERMADES PPKB
Kab. Banjarmasin

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/038/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pembinaan Keluarga Berencana
Capaian Program	: Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Target Kinerja Program	: 32.58%
Kegiatan	: Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
Hasil	: Jumlah PUS yang Terlayani KB MKJP
Target Kinerja Kegiatan	: 3472 Orang
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 3.472 Orang
Pagu Anggaran	: Rp150.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

KEGIATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT

KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH

KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN MKJP

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
1.1. Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
1.2. Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
1.3. Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
1.4. Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
	b. Latar belakang : Sebagian besar penduduk Banjarnegara tinggal di pedesaan dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, sosial ekonomi yang juga rendah, ditambah lagi dengan sarana transportasi, komunikasi serta letak geografis yang sulit dijangkau menyebabkan sebagian besar masyarakat pedesaan mengalami keterbatasan dalam mengakses pelayanan KB dibandingkan dengan masyarakat yang ada di perkotaan. Kesertaan ber-KB yang masih rendah, angka kelahiran yang masih tinggi, unmet need yang masih tinggi, serta rendahnya penggunaan kontrasepsi jangka Panjang, ini sangat dipengaruhi oleh dukungan pelayanan KB terutama dari sisi pembiayaan. Dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan dengan

	menurunnya daya beli masyarakat tidak hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga termasuk juga kebutuhan akan ber-KB. Kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya mengatur jarak aman kehamilan agar bayi yang dilahirkan sehat dan terhindar dari stunting, maka diperlukan upaya edukasi secara massif dengan melibatkan Mitra kerja terkait seperti Muslimat NU, Aisyiyah, Polri, TNI dan TP PKK yang mana mereka memiliki banyak Kader hamper disetiap Kecamatan maupun desa yang dapat membantu dalam memberikan KIE kepada calon akseptor serta menggerakkan akseptor ke fasilitas pelayanan yang tersedia.
	c. Dilaksanakan untuk : Memfasilitasi kebutuhan pelayanan KB masyarakat Kabupaten Banjarnegara
	d. Ruang lingkup : Pelayanan KB MKJP masyarakat Kabupaten Banjarnegara
2.2. Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana
2.3. Keluaran	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 32,58 persen.
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Meningkatnya kesertaan KB MKJP 35.00 %
	b. Target Kinerja : Terlayannya kebutuhan ber-KB Akseptor IUD, Implan, MOP dan MOW sebanyak 196 Akseptor dengan rincian 185, Akseptor KB IUD dan Implan, 2 Akseptor KB MOP, dan 9 Akseptor KB MOW yang difasilitasi
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	45 Jejaring dan Jaringan yang memberikan pelayanan KB Mitra kerja : Muslimat NU, Aisyiyah, Polri, TNI, TP PKK.
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara
3. Tahapan Aktivitas	
3.1. Pelayanan KB Reguler	Bulan Januari 2023 Minggu ke-2 s/d Bulan Desember 2023 Minggu ke-3

3.2.Persiapan Pelayanan KB Bersama Mitra	Bulan Februari Minggu ke-2 Bulan Maret Minggu ke-2 Bulan Juni Minggu ke-2 Bulan September Minggu ke-2 Bulan Desember Minggu ke-1
3.3 Pelayanan KB Bersama Mitra	Bulan Februari Bulan Maret Bulan Juli Bulan September Bulan Oktober Bulan Desember
3.4 Dst	

4 Anggaran

Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)
1.	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan	12 O/B	1.210.000	14.520.000
2.	Belanja ATK	1 paket	2.043,000	2.043.500
3.	Belanja Kertas dan Cover	1 paket	385.000	385.000
4.	Belanja Bahan cetak	1 paket	1.470.000	1.470.000
5.	Belanja bahan komputer	1 Paket	719.000	719.000
6.	Belanja benda pos	1 paket	10.000	220.000
7.	Belanja Jamuan makan minum rapat	1082 dus	35.000	37.870.000
8.	Belanja honorarium nara sumber	6 OK	450.000	2.700.000
9.	Belanja Tenaga Kesehatan	196 orang	36.750.000	36.750.000
10.	Belanja Juri Perlombaan	4 OK	150.000	600.000
11.	Belanja sewa mebel	300 unit	2.000.	600.000
12.	Belanja sewa audio	2 hari	2.610.800	5.221.600
13.	Belanja sewa gedung/ bangunan	8 hari	300.000	2.400.000
14.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	486/Kegiatan	75.000,00	36.450.000

	(bantuan Transpot) : Kompensasi Pelayanan MOW & MOP	33 O/K	100.000,00	3.300.000
15.	Belanja Hadiah perlombaan	1 Paket	4.750.000	4.750.000
	Jumlah			150.000.000

5 Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)


 Penanggung Jawab
 Kepala DISPERMADES PPKB
 Kab. Banjarnegara
HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
 NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/039/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DUKUNGAN AYOMAN KOMPLIKASI BERAT DAN KEGEALAN PENGGUNAAN MKJP TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pembinaan Keluarga Berencana
Capaian Program	: Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Target Kinerja Program	: 32.58%
Kegiatan	: Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
Hasil	: Jumlah PUS Yang Terlayani KB MKJP
Target Kinerja Kegiatan	: 3472 Orang
Sub Kegiatan	: Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat Dan Kegagalan Penggunaan MKJP
Keluaran	: Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat Dan Kegagalan Penggunaan MKJP
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 5 Laporan
Pagu Anggaran	: Rp50.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT

KONTRASEPSI SERTA PELAKSANA KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DUKUNGAN AYOMAN KOMPLIKASI BERAT DAN

KEGAGALAN PENGGUNAAN MKJP.

TAHUN 2023

I. Informasi Umum	
1.1 Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
1.2 Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
1.3 Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
1.4 Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
II. Rincian Aktivitas	
2.1 Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi berat dan kegagalan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
	b. Latar belakang : Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi menjadi sebuah kebutuhan dasar masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah, meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan, termasuk Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Kespro). Pelayanan KB dan Kespro saat ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian kuantitas saja tetapi juga berorientasi pada pemenuhan, permintaan, penyediaan pelayanan termasuk alat dan obat kontrasepsi yang berkualitas. Kegiatan pemasangan Kontrasepsi adakalanya mengalami kegagalan maupun komplikasi berat yang disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor medis maupun faktor individu akseptor KB itu sendiri Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap peserta KB MKJP (IUD, Implan, MOP, MOW) yang mengalami kegagalan

	ataupun komplikasi diberikan ayoman.				
	c. Dilaksanakan untuk : Memberikan ayoman bagi Akseptor KB MKJP yang mengalami kegagalan maupun komplikasi berat				
	d. Ruang lingkup : Akseptor KB MKJP yang mengalami kegagalan maupun komplikasi berat.				
2.2 Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana				
2.3 Keluaran	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar32,58 persen.				
2.4 Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				
	b. Target Kinerja : 5 Laporan				
2.5 Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	UPT DinkesPuskesmas se Kabupaten Banjarnegara (35 Puskesmas) RSUD Hj Anna LasmanahBanjarnegara RSI Banjarnegara RS PKU Muhammadiyah Klinik PKU Muhammadiyah Merden				
2.6 Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3.Tahapan Aktivitas					
3.1 Pengumpulan Data	BulanJanuari Minggu ke-1 danJuli Minggu ke-1				
3.2 Supervisi	Bulan Maret s/d November				
3.3.Pemberian Ayoman	Bulan Februari Minggu ke 3 Bulan November Minggu ke-1				
3.4 Dst					
2. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1	Belanja ATK	1 paket	2.799.100	2.799.100	
2	Belanja Kertas dan cover	1 paket	550.000	550.000	
3	Belanja Bahan cetak	1 paket	1.043.000	1.043.000	
4	Belanja Materai	25 buah	10.000	250.000	
5	Belanja makan minum rapat	135 dus/ orang	35.000	4.725.000	
6.	Belanja Honorarium Narasumber	4 OK	450.000	1.800.000	

7.	Belanja Jasa kantor/Narasumber	4 OK	450.000	1.800.000	
8.	Belanja jasa ayoman peserta KB	1 Paket	31.332.500	31.332.500	
9.	Belanja perjalanan dinas paket meeting/Transport	100 orang	75.000	7.500.000	
	Jumlah			50.000.000	

3. Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Pangung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/040/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pembinaan Keluarga Berencana
Capaian Program	: Cakupan PUS Yang Ingin Ber-kb Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)
Target Kinerja Program	: 6.96%
Kegiatan	: Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
Hasil	: Jumlah PUS Yang Mendapatkan Pembinaan Pelayanan KB
Target Kinerja Kegiatan	: 12.825 Orang
Sub Kegiatan	: Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 56 Laporan
Pagu Anggaran	: Rp50.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSI KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT

KONTRASEPSI SERTA PELAKSANA KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI di FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JEJARING DAN JARINGANNYA.

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
1.1 Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
1.2 Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
1.3 Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
1.4 Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jejaring dan Jaringannya.
	b. Latar belakang : Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi menjadi sebuah kebutuhan dasar masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah, meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan, termasuk Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Kespro). Pelayanan KB dan Kespro saat ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian kuantitas saja tetapi juga berorientasi pada pemenuhan, permintaan, penyediaan pelayanan termasuk alat dan obat kontrasepsi yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas harus selalu dijaga oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB dan sudah teregistrasi dalam K0/KB termasuk jejaring dan jaringannya. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas harus dapat dipenuhi oleh Faskes tersebut dengan melakukan kajian mandiri secara rutin maupun dilakukan supervise

	fasilitatif oleh DISPERMADES PPKB yang mengampu kegiatan pelayanan KB. Supervisi fasilitatif diawali dengan melakukan analisis kebutuhan pelayanan KB pada semua faskes dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pelayanan KB pada faskes tertentu yang mempunyai cakupan pelayanan KB rendah.
	c. Dilaksanakan untuk : Meningkatkan Mutu Pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan KB yang terregistrasi dalam K0/KB
	d. Ruang lingkup : Faskes yang sudah teregistrasi dalam K0/KB serta memberikan Pelayanan KB
2.2. Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana
2.3. Keluaran	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 32,58 persen.
2.4. Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	b. Target Kinerja : 45 laporan
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	UPT Dinkes Puskesmas se Kabupaten Banjarnegara (35 Puskesmas) RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara Rumah Sakit Islam Banjarnegara RSU PKU MuhammadiyahBanjarnegara RS Emanuel Banjarnegara Klinik PKU MuhammadiyahMerden Klinik PKU MuhammadiyahKalibening Klinikl bunda Klinik MuaraKasih Klinik RestuBunda Rumah Bersalin Anugrah PMB Liliana Pujiningrum PMB Dian Tri L PMB Fitri Handayani PMB Eryana Febriyan PMB Dirbadiyah PMB Yuliantika PMB Asrinah
2.6. Lokasi	Kabupaten Banjarnegara
3. Tahapan Aktivitas	
3.1. EvaluasiPelayanan KB	Bulan Februari Mingguke-1 danJuli Minggu ke-1
3.2. Supervisivasilitatif	Bulan Maret s/d November

3.3. Koordinasi Pelayanan KB di Faskes	Bulan Februari Minggu ke-3 Bulan Maret minggu ke-3 Bulan Mei minggu ke-2 Bulan Juni minggu ke-4 Bulan Juli Minggu ke-1 Bulan Oktober Minggu ke-1 Bulan November Minggu ke-1 dan ke-3				
3.4. Dst					
4. Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Belanja ATK	1 paket	2.388.000	2.388.000	
2.	Belanja kertas dan cover	1 Paket	825.000	825.000	
3.	Belanja Bahan cetak	1 Paket	1.047.000	1.047.000	
4.	Belanja makan dan minuman rapat	464 Dus	16.240.000	16.240.000	
5.	Belanja jasa Juri perlombaan	5 OK	150.000	750.000	
6.	Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota/bantuan transport	320 keg/orang	24.000.000	24.000.000	
7.	Belanja hadiah perlombaan	1 Paket	4.750.000	4.750.000	
	Total			50.000.000	
5. Lain-Lain (diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)					
 Penanggung Jawab Kepala DISPERMADES PPKB Kab. Banjarnegara HENDRO CAHYONO, SE, M.Si NIP. 19681130 199703 1 007					



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/041/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PROMOSI DAN KONSELING KB PASCA PERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pembinaan Keluarga Berencana
Capaian Program	: Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)
Target Kinerja Program	: 6.96%
Kegiatan	: Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
Hasil	: Jumlah PUS Yang Mendapatkan Pembinaan Pelayanan KB
Target Kinerja Kegiatan	: 12.825 Orang
Sub Kegiatan	: Promosi Dan Konseling KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran
Keluaran	: Jumlah Orang Yang Mengikuti Promosi Dan Konseling KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 12.825 Orang
Pagu Anggaran	: Rp40.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

KEGIATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT

KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH

KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN PROMOSI DAN KONSELING KB PASCA KEGUGURAN

TAHUN 2023

3.4.1.1 Informasi Umum	
1.1 Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
1.2 Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
1.3 Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
1.4 Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1 Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
	b. Latar belakang : Sebagian besar penduduk Banjarnegara tinggal di pedesaan dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, sosial ekonomi yang juga rendah, ditambah lagi dengan sarana transportasi, komunikasi serta letak geografis yang sulit dijangkau menyebabkan sebagian besar masyarakat pedesaan mengalami keterbatasan dalam mengakses pelayanan KB dibandingkan dengan masyarakat yang ada di perkotaan. Kesertaan ber-KB yang masih rendah, angka kelahiran yang masih tinggi, unmet need yang masih tinggi, serta rendahnya penggunaan kontrasepsi jangka Panjang. Peningkatan kesertaan KB MKJP khususnya KB Pasca Persalinan dan Pasca keguguran juga masih sangat rendah sehingga mempengaruhi capaian KB MKJP secara keseluruhan.
	c. Dilaksanakan untuk : Memfasilitasi peningkatan kesertaan MKJP

	khususnya KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Kabupaten Banjarnegara
	d. Ruang lingkup : Peningkatan ketrampilan para provider KB /Bidan dalam promosi dan konseling KB Pasca persalinan dan Pasca keguguran DI Kabupaten Banjarnegara
2.2 Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana
2.3 Keluaran	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 6,96 persen.
2.4 Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran b. Target Kinerja : 45 orang (Bidan)
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	45 Fasilitas Kesehatan pemerintah dan Swasta di Kabupaten Banjarnegara
2.6 Lokasi	Kabupaten Banjarnegara

3 Tahapan Aktivitas

3.1. Koordinasi	Bulan Juni 2023 Minggu ke-1
3.2 Sosialisasi Teknik KIE KB	Bulan Juni Minggu ke 3
3.3 Monitoring pelayanan KB PP	Bulan Februari Bulan April Bulan Juli Bulan September Bulan Desember
3.4 dst	

4 Anggaran

Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Belanja ATK	1 paket	1.310.500	1.310.500	
2.	Belanja Kertas dan Cover	1 paket	440.000	440.000	
3	Belanja Bahan cetak	1 paket	6.019.500	6.019.500	
4.	Belanja Benda Pos	1 Paket	130.000	130.000	
4	Belanja Jamuan makan minum rapat	300 dos	35.000	10.500.000	
5.	Belanja Honorarium Nara sumber	8 OK	450.000	3.600.000	
6	Biaya perjalanan dinas paket meeting dalam kota	240 OK/Keg	.75.000	18.000.000	
	Jumlah			40.000.00	

5 Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Penanggung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara

HENDRO GAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/042/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN ORIENTASI DAN PELATIHAN TEKNIS PENGELOLA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS) TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Capaian Program	: Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Target Kinerja Program	: 75.99%
Kegiatan	: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Hasil	: Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan
Target Kinerja Kegiatan	: 60 Kelompok
Sub Kegiatan	: Orientasi Dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Orientasi Dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 3 (BKB, BKR, BKL) Laporan
Pagu Anggaran	: Rp130.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PERMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (KS)

KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN

KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SUB KEGIATAN ORIENTASI DAN PELATIHAN TEKNIS PENGELOLA KETAHANAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga/UPPKS)

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
1.1 Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
1.2 Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
1.3 Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
1.4 Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1 Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui orientasi dan pelatihan teknis pengelola kader.
	b. Latar belakang : - Bina keluarga adalah suatu kelompok kegiatan yang terdiri dari keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan keluarga yang mempunyai balita, remaja dan lansia . Bina keluarga dikelompokkan sesuai dengan fase kehidupan manusia, yaitu kelompok keluarga yang mempunyai bayi sampai dengan balita masuk dalam kelompok Bina Keluarga Balita (BKB). Keluarga yang mempunyai anak remaja umur 10 – 24 tahun masuk dalam kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), sedangkan keluarga yang mempunyai lansia atau keluarga lansia masuk dalam kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)

	- Pengasuhan anak balita dalam kelompok BKB sangat penting agar keluarga bisa mengasuh putra putrinya, memberikan stimulasi tumbuh kembang sesuai dengan umur balita dan mencegah terjadinya stunting. - Kelompok BKR dinilai sangat strategis dalam mewujudkan generasi muda yang potensial melalui peningkatan kepedulian, pengetahuan, sikap keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja. Keluarga, terutama orang tua sangat menentukan dalam membentuk karakter, pendidikan kesehatan reproduksi serta mengarahkan masa depan remaja. Kelompok BKR dibentuk agar orang tua bisa mendampingi anak remajanya yang sedang mengalami perubahan fisik, emosional dan sosial sehingga terhindar dari masalah kesehatan reproduksi. - Kelompok BKL dibentuk agar keluarga bisa mendampingi lansia dengan 7 dimensi lansia tangguh yaitu: dimensi fisik, intelektual, spiritual, sosial, emosional, vokasional, lingkungan. Keluarga juga diharapkan bisa melakukan pendampingan perawatan jangka panjang kepada lansia di rumahnya. Dengan meningkatnya usia harapan hidup lansia diharapkan lansia tetap sehat, mandiri, dan tetap berkarya - Pada tahun 2023 Banjarnegara sebagai lokus daerah stunting pada 30 Desa yang harus di garap dengan sungguh sngguh dengan berbagai program dari lintas sektor - Pada tahun 2023 kegiatan Bina Keluarga di Kabupaten Banjarnegara juga sebagai Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dengan sasaran 40 BKB, 55 kelompok BKR, 31 kelompok BKL, 40 kelompok PIK Remaja dan 79 kelompok UPPKS. Kegiatan ini perkembangan kegiatannya dipantau oleh Pemerintah Pusat - Menindaklanjuti Perda Ketahanan Keluarga Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera perlu diterapkan dalam kegiatan Bina keluarga di Kabupaten Banjarnegara Menindaklanjuti usulan sebagian Kecamatan pada tahun di Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan pembinaan dan pelatihan
--	--

	kelompok Bina Keluarga BKB, BKR, BKL pada tahun 2023.
	c. Dilaksanakan untuk : MMeningkatnya peran pengelola Tri bina keluarga dan meningkatnya kesertaan anggota Tribina dalam upaya mencegah stunting.
	d. Ruang lingkup : 1)Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader kelompok tribina dalam mengelola kelompok BKB, BKR dan BKL; 2)Meningkatkan peran kader dalam melakukan pendampingan keluarga yang memiliki anak, remaja dan lansia dalam kelompok Tribina 3)Meningkatnya peran keluarga anggota Tri bina keluarga dalam pengasuhan anak terutama pada 1000 HPK dan peran keluarga dalam upaya mencegah stunting
2.2 Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
2.3 Keluaran	1. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB; sebanyak 75,99% 2. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB sebanyak 61,5% 3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB sebanyak 36,7% 4. Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Penongkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri sebanyak 50,72%
2.4 Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	b. Target Kinerja : 3 Laporan
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	45 Fasilitas Kesehatan pemerintah dan Swasta di Kabupaten Banjarnegara
2.6 Lokasi	Kabupaten Banjarnegara

3 Tahapan Aktivitas	
3.1. Orientasi BKB, BKR, BKL di Kec.Susukan dan Klampok	Bulan April s.d Mei 2023
3.2 Orientasi BKB, BKR, BKL di Kec.Mandiraja dan Purwanegara	Bulan April s.d Mei 2023
3.3 Orientasi BKB, BKR, BKL di Kec.Bawang, banjarnegara, Pagedongan	Bulan April s.d Mei 2023
3.4 Orientasi BKB, BKR, BKL di Kec. Madukara dan Sigaluh	Bulan April s.d Mei 2023
3.5 Orientasi BKB, BKR, BKL di Kec. Banjarmangu, Wanadadi dan Rakit	Bulan April s.d Mei 2023
3.6 Orientasi BKB, BKR, BKL di Kec.Punggelan	Bulan April s.d Mei 2023
3.7 Orientasi BKB, BKR, BKL di Kec. Karangobar dan Wanayasa	Bulan April s.d Mei 2023
3.8 Orientasi BKB, BKR, BKL di Kec. Batur	Bulan April s.d Mei 2023
3.9 Orientasi BKB, BKR, BKL di Kec. Pejawaran dan Pagentan	Bulan April s.d Mei 2023
3.10 Orientasi BKB, BKR, BKL di Kec. Kalibening dan Pandanarum	Bulan April s.d Mei 2023
3.11 Evaluasi dan Pelaporan	Bulan Juni s.d Desember 2023

3 Anggaran

Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Belanja ATK	1 paket	1.471.300	1.471.300	
2.	Belanja Kertas dan Cover	1 paket	550.000	550.000	
3.	Belanja Bahan cetak	1 paket	12.838.900	12.838.900	
4.	Belanja Bahan Komputer	1 paket	579.800	579.800	

5.	Belanja Benda Pos	1 Paket	60.000	60.000	
6.	Belanja Jamuan makan minum rapat	1 Paket	25.550.000	25.550.000	
7.	Belanja Honorarium Nara sumber	1 Paket	25.200.000	25.200.000	
8.	Bantuan Transport Peserta	1 Paket	47.500.000	47.500.000	
9.	Belanja hadiah lomba dan piala	1 Paket	16.500.000	16.500.000	
	Jumlah			130.000.00	

4 Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Responsible Head
Head of DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara
HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/043/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN ORIENTASI/PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS) TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Capaian Program	: Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri
Target Kinerja Program	: 50.72%
Kegiatan	: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Hasil	: Jumlah Kelompok UPPKS yang difasilitasi
Target Kinerja Kegiatan	: 5 Kelompok
Sub Kegiatan	: Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 28 Orang
Pagu Anggaran	: Rp30.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PERMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (KS)

KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN

KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SUB KEGIATAN ORIENTASI DAN PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER

KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
1.1 Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
1.2 Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
1.3 Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
1.4 Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1 Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Meningkatnya usaha ekonomi produktif anggota kelompok UPPKA dalam upaya meningkatkan pendapatan dan mencegah stunting.
	b. Latar belakang : - Masih banyaknya pasangan usia subur yang mengalami keterbatasan ekonomi /miskin sehingga harus di entaskan. Salah satu upaya untuk mengentaskan dengan memberdayakan keluarga tersebut agar meningkat pendapatannya; - Upaya pemberdayaan dilakukan dengan pelatihan ketrampilan dan kemampuan pengelolaan usaha ekonomi produktif; - Keluarga ini perlu dilakukan dengan pembentukan kelompok sebagai wadah pembinaan dalam bentuk kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA).

	c. Dilaksanakan untuk : 1) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta dalam usaha ekonomi produktif; 2) Meningkatnya usaha pengolahan bahan lokal sebagai pemenuhan gizi keluarga dalam upaya mencegaah stunting 3) Meningkatkan jiwa kewirausahaan agar mau dan mampu berusaha dalam meningkatkan pendapatannya; 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ekonomi produktif untuk mewujudkan keluarga sejahtera; 5) Terbinanya kelompok UPPKA yang telah terbentuk.
	d. Ruang lingkup : Meningkatnya usaha ekonomi produktif anggota kelompok UPPKA dalam upaya meningkatkan pendapatan
2.2 Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
2.3 Keluaran	1. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB; sebanyak 75,99% 2. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB sebanyak 61,5% 3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB sebanyak 36,7% 4. Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Penongkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri sebanyak 50,72%
2.4 Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	b. Target Kinerja : 24 orang
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	Dinindagkop UKM
2.6 Lokasi	Kabupaten Banjarnegara

3 Tahapan Aktivitas					
3.1. Persiapan		Bulan Maret 2023			
3.2 Orientasi Kewirausahaan		Bulan April 2023			
3.3Praktek pembuatan Kripik dan roti di UPPKS Putra roti		Bulan April 2023			
3.4Praktek pembuatan Kripik dan roti di UPPKS Putra roti		Bulan April 2023			
3.5Pelaporan		Bulan Mei 2023			
3.6Monitoring		Bulan Meil 2023			
3 Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Belanja ATK	1 paket	371.700	1.471.300	
2.	Belanja Kertas dan Cover	1 paket	495.000	550.000	
3.	Belanja Bahan cetak	1 paket	872.800	12.838.900	
4.	Belanja Bahan Prakrek	1 paket	7.590.000	579.800	
5.	Belanja Kantor Lainnya	1 Paket	3.160	60.000	
6.	Belanja Jamuan makan minum rapat	1 Paket	3.210.000	3.210.000	
7.	Belanja Honorarium Nara sumber	1 Paket	5.400.000	5.400.000	
8.	Bantuan Transport Peserta	1 Paket	5. 500.000	5.400.000	
	Jumlah			30.000.00	
4 Lain-Lain (diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)					
 Responsible Jawab Kepala DisPERMADES PPKB Kab. Banjarnegara HENDRO CAHYONO, SE, M.Si NIP. 19681130 199703 1 007					



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/044/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS) TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Capaian Program	: Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Target Kinerja Program	: 10%
Kegiatan	: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Hasil	: Jumlah Kelompok UPPKS yang difasilitasi
Target Kinerja Kegiatan	: 5 Kelompok
Sub Kegiatan	: Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 6 (BKB, BKR, BKL, PPKs, PIK, UPPKS) Laporan
Pagu Anggaran	: Rp25.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PERMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (KS)

KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN

KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SUB KEGIATAN PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN

DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga/UPPKS)

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
1.1 Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
1.2 Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
1.3 Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
1.4 Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1 Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Meningkatnya peran anggota PIK Remaja dalam mencegah pernikahan dini dan stunting.
	b. Latar belakang : - Pada tahun 2019 banyak remaja yang mengalami pernikahan dini sebanyak 32% pernikahan di bawah 20 th dan 181 kasus pernikahan di bawah 16 th dengan dispensasi Pengadilan Banjarnegara. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Banjarnegara sejak tahun 2003 – 2019 cukup tinggi yaitu 478 kasus dengan rincian 238 HIV dan 240 AIDS (Dinkes Banjarnegara, 2019). Dari kasus HIV/AIDS tersebut juga banyak dialami oleh remaja Banjarnegara - Banyak remaja yang belum tahu tentang kesehatan reproduksi dan mereka mencari informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) lebih banyak (71%) pada teman sebayanya atau media sosial.

	- Pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam wadah PIK Remaja sebagai salah satu cara agar remaja mendapat informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan konseling dengan teman sebayanya
	c. Dilaksanakan untuk : 1) Mensosialisasikan Program GenRe untuk mencegah pernikahan dini, seks pra nikah, napza dan stunting 2) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan remaja dalam pengelolaan PIK Remaja 3) Meningkatkan peran pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam memberikan informasi dan konseling KRR kepada teman sebayanya.dan upaya pencegahan stunting; 4) Terwujudnya remaja tegar yang berperilaku sehat, terhindar dari nikah dini, seks pra nikah, napza dan menjadi contoh model teman sebayanya serta mencegah stunting.
	d. Ruang lingkup : Meningkatnya pemahaman dan peran anggota PIK Remaja dalam mencegah pernikahan dini dan stunting
2.2 Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
2.3 Keluaran	1. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB; sebanyak 75,99% 2. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB sebanyak 61,5% 3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB sebanyak 36,7% 4. Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Penongkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri sebanyak 50,72%
2.4 Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	b. Target Kinerja : Dokumen terdiri dari 1. Orientasi PIK Remaja berbasis masyarakat

	2. Capacity building PIK Remaja berbasis sekolah 3. Pembinaan anggota Forum PIK Remaja 4. Lomba PIK Remaja
2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	PIK Remaja
2.6 Lokasi	Kabupaten Banjarnegara

3 Tahapan Aktivitas	
3.1. Persiapan	Bulan April 2023
3.2 Orientas PIK Remaja berbasis masyarakat	Bulan Juli 2023
3.3 Capacity building PIK Remaja berbasis sekolah	Bulan Juli 2023
3.4 Pembinaan Forum PIK Remaja	Bulan Maret dan Mei 2023
3.5 Pelaporan	Bulan Agustus 2023
3.6 Monitoring	Bulan Agustus 2023

3 Anggaran

Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Belanja ATK	1 paket	379.400	379.400	
2.	Belanja Kertas dan Cover	1 paket	330.000	330.000	
3.	Belanja Bahan cetak	1 paket	1.215.600	1.215.600	
4.	Belanja Jamuan makan minum rapat	1 Paket	6.475.000	6.475.000	
5.	Belanja Honorarium Nara sumber	1 Paket	3.600.000	3.600.000	
6.	Bantuan Transport Peserta	1 Paket	8.250.000	8.250.000	
7.	Belanja Hadiah Lomba	1 Paket	4.750.000	4.750.000	
	Jumlah			25.000.00	

4 Lain-Lain
(diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)



Pemangung Jawab
Kepala DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarmasin

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Nomor : 050/045/KAK_DISPERMADES PPKB/2022
Tanggal : 1 September 2022

SUB KEGIATAN PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA) TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Kerja/SKPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
Program	: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Capaian Program	: Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Target Kinerja Program	: 10%
Kegiatan	: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Hasil	: Jumlah Kelompok UPPKS yang difasilitasi
Target Kinerja Kegiatan	: 5 Kelompok
Sub Kegiatan	: Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
Target Kinerja Sub Kegiatan	: 2 (Saka Kencana, Duta Genre) Laporan
Pagu Anggaran	: Rp60.000.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PERMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (KS)

KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN

KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SUB KEGIATAN PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN

DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI

BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA)

TAHUN 2023

1. Informasi Umum	
1.1 Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
1.2 Penanggung Jawab	HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
1.3 Waktu Pelaksanaan	Januari s/d Desember 2023
1.4 Referensi Perencanaan	a. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026
	b. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
2. Rincian Aktivitas	
2.1 Deskripsi Ringkas	a. Substansi Kegiatan : Meningkatnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja kepada generasi muda serta pemilihan duta generasi berencana sebagai panutan.
	b. Latar belakang : - Masih banyaknya remaja yang belum memahami kesehatan reproduksi remaja; - Masih banyaknya masalah remaja seperti pernikahan dini. Pada tahun 2019 sebanyak 32% untuk pernikahan di bawah usia 20 th pernikahan dengan ijin Pengadilan Agama pada tahun 2019 sebanyak 181 kasus pada usia di bawah 16 th. adanya kasus napza dan HIV/aid pada remaja; - Adanya Kasus kematian bayi dan ibu yang dialami oleh keluarga yang masih remaja; - Perlu adanya sosok remaja sebagai panutan dan terlibat dalam kegiatan

	kependudukan, KB dan kesehatan reproduksi serta pembangunan keluarga.
	c. Dilaksanakan untuk : 1) Mencegah terjadinya Triad KRR (nikah dini, seks bebas dan napza) dikalangan remaja 2) Meningkatkan peran anggota Saka Kencana dan Duta GenRe di lingkungan anggota pramuka dan remaja dalam masalah kesehatan reproduksi remaja 3) Anggota Saka Kencana ikut mempromosikan kegiatan kependudukan, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sedangkan duta GenRe bisa menjadi panutan, contoh remaja untuk meraih prestasi dengan hidup sehat 4) Terpilihnya Duta Genre yang menjadi panutan remaja dalam hidup sehat dan merencanakan masa depan
	d. Ruang lingkup : Meningkatkan peran generasi berencana dalam pendidikan kesehatan reproduksi remaja
2.2 Sasaran (Outcome)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
2.3 Keluaran	1. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB; sebanyak 75,99% 2. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB sebanyak 61,5% 3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB sebanyak 36,7% 4. Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri sebanyak 50,72%
2.4 Indikator & Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
	b. Target Kinerja : 2 Dokumen (Saka Kencana dan Duta Genre)

2.5. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	Sekolah Menengah Atas dan atau sederajat				
2.6 Lokasi	Kabupaten Banjarnegara				
3 Tahapan Aktivitas					
3.1. Persiapan	Bulan Januari 2023				
3.2 Pelatihan Saka Kencana	Bulan Januari s.d Desember 2023				
3.3 Pemilihan Duta GenR	Bulan Februari 2023				
3.4 Pelaporan	Bulan Desember 2023				
3.5 Monitoring	Bulan Januari s.d Desember 2023				
3 Anggaran					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banjarnegara					
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga Satuan	Total (Rp)	Ket
1.	Belanja ATK	1 paket	463.200	463.200	
2.	Belanja Kertas dan Cover	1 paket	385.000	385.000	
3.	Belanja Bahan cetak	1 paket	2.425.600	2.425.600	
4.	Belanja Jamuan makan minum rapat	1 Paket	16.135.000	16.135.000	
5.	Bantuan ongkos jahit	1 Paket	241.800	241.800	
6.	Belanja Pakaian Batik	1 Paket	400.000	400.000	
7.	Belanja Honorarium Nara sumber	1 Paket	7.150.000	7.150.000	
8.	Bantuan Transport Peserta	1 Paket	16.500.000	16.500.000	
9.	Belanja Hadiah Lomba	1 Paket	16.300.000	16.300.000	
	Jumlah			60.000.00	
4 Lain-Lain (diisi tambahan keterangan lain yang diperlukan)					
 Penanggung Jawab Kepala DISPERMADES PPKB Kab. Banjarnegara HENDRO CAHYONO, SE, M.Si NIP. 19681130 199703 1 007					